



Laporan Akhir TIM TRANSISI PROGRAM SKALA

JULI - DESEMBER 2022



LAPORAN AKHIR
TIM TRANSISI
PROGRAM SKALA

JULI - DESEMBER 2022

Daftar Isi

Daftar isi	i
Daftar Singkatan	iii
1. Ringkasan Eksekutif	1
2. Latar Belakang	4
3. Tujuan dan Sasaran Tim Transisi	6
4. Strategi Pelaksanaan dan Implementasi	7
5. Hasil Kunci Transisi Program SKALA	9
5.1 Dukungan Teknis Penguatan Kebijakan Otonomi Khusus di Tingkat Nasional	9
5.1.1 Perencanaan dan Penganggaran	9
5.1.2 Pelaporan	11
5.1.3 Panduan	12
5.2 Dukungan Teknis Penguatan Kebijakan Otonomi Khusus di Tingkat Daerah	12
5.2.1 Provinsi Aceh	12
5.2.2 Provinsi Papua	13
5.2.3 Provinsi Papua Barat	14
5.3 Dukungan Teknis Adopsi dan Replikasi Sistem Informasi Berbasis Lokal (LOGIS)	16
5.3.1 Provinsi Aceh	16
5.3.2 Provinsi Papua	17
5.3.3 Provinsi Papua Barat	19
5.3.4 Perbandingan Kemajuan SIO Papua dan SAIK+	21
6. Pembelajaran, Tantangan, dan Adaptasi	24
6.1 Pembelajaran	24
6.2 Tantangan	26
6.3 Adaptasi	26
7. Rekomendasi untuk implementasi Program SKALA	27
7.1 Rekomendasi untuk dukungan teknis penguatan Otonomi Khusus di tingkat pusat	27
7.1.1 Rekomendasi Dukungan Teknis untuk Bappenas	27
7.1.2 Rekomendasi Dukungan Teknis untuk Kemenkeu	28
7.1.3 Rekomendasi Dukungan Teknis untuk Kemendagri	28

7.2 Rekomendasi untuk dukungan teknis penguatan Otonomi Khusus di tingkat daerah	28
7.2.1 Rekomendasi Dukungan Teknis di Aceh	29
7.2.2 Rekomendasi Dukungan Teknis di Papua	29
7.2.3 Rekomendasi Dukungan Teknis di Papua Barat	30
7.2.4 Rekomendasi Dukungan Teknis di DOB	31
7.3 Rekomendasi untuk dukungan adopsi dan replikasi LOGIS	32
7.3.1 Rekomendasi Dukungan Teknis di Aceh (SIGAP)	32
7.3.2 Rekomendasi Dukungan Teknis di Papua (SIO Papua)	33
7.3.3 Rekomendasi Dukungan Teknis di Papua Barat (SAIK+)	33
7.3.4 Rekomendasi Dukungan Teknis di DOB	34
7.4 Rekomendasi untuk Knowledge Management/ Policy Brief dan GEDSI	35
8. Laporan Keuangan	37
9. Rencana Serah Terima	38
9.1 Aset dan kantor	38
9.1.1 Aset dan Kantor di Jayapura	38
9.1.2 Aset dan Kantor di Banda Aceh	39
9.2 Kemitraan dan Keterlibatan	40
10. Declaration	43

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BaKTI	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bimtek	Bimbingan Teknis
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
DAU	Dana Alokasi Umum
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade Australia
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DOB	Daerah Otonomi Baru
DPMG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
DPRA	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
GEDSI	Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial
HKPD	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko	
Pulhukam	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
K/L	Kementerian / Lembaga
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Koseka	Koordinator Sensus Kecamatan
LOGIS	Locally Generated Information System
Musrenbang	Musyawaharah Rencana Pembangunan
OAP	Orang Asli Papua
Otsus	Otonomi Khusus
PAD	Pendapatan Asli Daerah

PD	Perangkat Daerah
Pemilu	Pemilihan Umum
Perdasi	Peraturan Daerah Provinsi
Perdasus	Peraturan Daerah Khusus
Pj Gubernur	Penjabat Gubernur
PP	Peraturan Pemerintah
PPSB	Prioritas Program Strategis Bersama
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
Prodeskel	Profil Desa dan Kelurahan
PAITUA	Papua Integrasi Satu Data
PROSPPEK	Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung
RAP	Rencana Anggaran dan Program
RAPPP	Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua
Regsosek	Registrasi Sosial Ekonomi
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SAIK+	Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
SDM	Sumber Daya Manusia
SEPAKAT	Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu
SIGAP	Sistem Informasi Gampong
SIKD	Sistem Informasi Keuangan Daerah
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa
SIO Papua	Sistem Informasi Orang Papua
SIPD	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SOTK	Susunan Organisasi Tata Kerja
SKALA	Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
SKPA	Satuan Kerja Perangkat Aceh
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
UU	Undang-undang
Q/A	<i>Quality Assurance</i>



1

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini mencakup informasi seputar hal-hal yang telah dilakukan dan dihasilkan selama periode transisi (sejak berakhirnya program KOMPAK, hingga mulai dijalankannya program SKALA), realisasi penggunaan anggaran, serta hal-hal yang perlu diserahterimakan kepada Program SKALA. Periode transisi ini berlangsung sejak Juli 2022 sampai dengan Desember 2022.

Tim Transisi Program SKALA selanjutnya disebut Tim Transisi, bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah RI, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sebagai hasil dari pelaksanaan Program KOMPAK maupun program-program dukungan Pemerintah Australia lainnya. Upaya ini dilakukan dengan melanjutkan dukungan teknis, secara terbatas, terhadap beberapa kegiatan Program KOMPAK yang masih perlu dilanjutkan, yaitu dukungan teknis terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus bagi Papua, Papua Barat dan Aceh, serta dukungan teknis terkait replikasi dan perluasan sistem informasi desa. Dukungan teknis yang disediakan berupa dukungan teknis kebijakan bagi pemerintah pusat, maupun dukungan dan fasilitasi teknis di daerah. Dengan tersedianya dukungan teknis secara terbatas ini, harapannya hubungan yang terkelola dengan baik ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan Program SKALA.



Tim Transisi melanjutkan secara terbatas dukungan teknis terhadap beberapa praktik dan pembelajaran KOMPAK, yaitu dukungan teknis untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus serta dukungan teknis untuk replikasi dan perluasan sistem informasi desa di Papua, Papua Barat dan Aceh. Penentuan lokasi dukungan Tim Transisi dilakukan sebelum pembentukan DOB di wilayah Papua dan Papua Barat.

Tim Transisi mengembangkan rencana kerja yang adaptif, dengan mempertimbangkan kegiatan Program KOMPAK yang berpotensi memberi daya ungkit (*by design*), sambil pada saat yang sama memanfaatkan peluang yang ada (*by opportunity*) dan/atau berdasarkan permintaan dari Pemerintah Indonesia pada isu-isu spesifik dari kegiatan tersebut (*by demand*). Berbagai peluang dan isu-isu yang telah dipetakan kemudian dikelompokkan menjadi fokus dukungan pada kedua kelompok besar kegiatan yaitu dukungan terkait efektivitas pelaksanaan otonomi khusus serta dukungan replikasi dan perluasan sistem informasi desa. Kedua dukungan tersebut diselenggarakan melalui

penyediaan *input* atau saran teknis yang diberikan oleh tim kerja yang terdiri dari tenaga ahli dengan peran dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, serta dukungan teknis fasilitasi acara (*event*), termasuk perjalanan dinas mitra pemerintah jika dianggap perlu. Strategi penyediaan dukungan ini dilakukan guna memastikan terjadinya alih pengetahuan dan kemampuan terutama kepada pemerintah daerah. Penyediaan dukungan ini dijalankan secara adaptif, melalui analisis atas berbagai dinamika dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi.

Pemerintah Indonesia terlibat secara aktif dan menunjukkan kepemilikan yang kuat terhadap seluruh kegiatan Tim Transisi. Hal ini terjadi baik di tingkat Pusat (Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu) maupun di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Sebagai contoh, keterlibatan aktif dan kepemilikan yang tinggi dari Kementerian Keuangan, yang disertai fasilitasi teknis Tim Transisi, telah mendorong dihasilkannya *template* Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otonomi Khusus. Tersedianya *template* RAP dan integrasi dengan SIKD merupakan implementasi dari PMK No. 76 Tahun 2022 dan berperan untuk mengurai isu koherensi dan efektivitas belanja otonomi khusus yang selama ini dihadapi. Bantuan teknis ini tidak hanya bermanfaat bagi Kementerian Keuangan, namun juga bagi pemerintah daerah. Bantuan ini memudahkan pemerintah daerah untuk melaksanakan peran dan tanggung-jawabnya untuk merencanakan dan mengalokasikan dana otonomi khusus yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain RAP yang tersedia sesuai rencana, hasil lainnya adalah terlatihnya 531 orang (407 laki-laki dan 124 perempuan) yang telah dapat menyusun RAP dan menggunakan SIKD Otsus melalui bimbingan teknis simulatif selama event Bimtek.

Selain kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua dan Papua Barat, fasilitasi dan peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan PMK No 76 Tahun 2022 juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Aceh. Berbeda dengan fasilitasi di Papua dan Papua Barat yang fokus pada perencanaan dan penganggaran, untuk Aceh fokus dukungan diberikan pada pengembangan instrumen pelaporan tahunan Otsus yang juga telah diujicobakan di Aceh. Dukungan fasilitasi instrumen pelaporan ini sangat penting untuk memastikan terjalannya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Aceh serta dilaporkannya seluruh kemajuan dari pemanfaatan dana Otsus di Aceh.

Keterlibatan dan kepemilikan yang tinggi juga ditunjukkan oleh Kemendagri dalam memastikan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus yang lebih efektif di Papua dan Papua Barat. Kemendagri, dengan dukungan Tim Transisi, telah menyelenggarakan pembahasan terkait pengembangan nomenklatur dan kodifikasi khusus yang menampung kegiatan-kegiatan strategis bagi otonomi khusus yang sesuai dengan konteks tanah Papua. Hal ini bertujuan untuk memastikan bawah dana Otsus yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat benar-benar direncanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara tepat.

Kepemilikan yang tinggi dan partisipasi aktif juga terjadi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Diantaranya ditunjukkan oleh Pj Gubernur dan lintas OPD di Provinsi Aceh, dimana hasil evaluasi otonomi khusus telah dijadikan bahan masukan bagi disusunnya usulan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat menyangkut masa depan Otsus Aceh. Selain kajian pemanfaatan Dana Otsus Aceh, melalui dukungan Tim Transisi juga telah dihasilkan Kajian Identifikasi Potensi Peningkatan Sumber Pendapatan dan Pembiayaan Provinsi Aceh, disediakannya naskah akademik Qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh, serta tersedianya kajian Penataan Ulang SOTK Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Kepemilikan dan dukungan yang tinggi juga ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat. Sedikitnya 8 kabupaten di Provinsi Papua telah menganggarkan kegiatan SIO Papua untuk tahun anggaran 2023. Sementara itu Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah mewajibkan keseluruhan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat untuk menganggarkan kegiatan SAIK+. Selain itu, Tim Transisi telah memberikan input teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memetakan berbagai kendala, tantangan dan rekomendasi pelaksanaan PROSPPEK ke depan. Dengan adanya pengalokasian APBD 2023 di atas maka dapat dipastikan keberlanjutan dari berbagai upaya pengembangan data social ekonomi sektoral berbasis kampung di Papua dan Papua Barat yang terpilah OAP dan Non-OAP.

Penguatan tata kelola data di tingkat lokal juga merupakan prioritas bagi Pemerintah Aceh, Papua dan Papua Barat, kepemilikan Pemda yang sangat kuat juga ditunjukkan terhadap berbagai kegiatan dukungan adopsi dan replikasi sistem informasi berbasis desa/lokal. Pemerintah Provinsi Aceh dengan dukungan Tim Transisi telah menghasilkan Peta Jalan SIGAP (Sistem Informasi Gampong) sebagai basis penguatan implementasi SIGAP di seluruh gampong yang ada di Aceh. Sementara itu di Tanah Papua, dukungan Tim Transisi untuk penguatan SAIK+ untuk Provinsi Papua Barat dan SIO Papua untuk Provinsi Papua juga telah menghasilkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi untuk mendorong perluasan sistem tersebut di seluruh kabupaten/kota di kedua provinsi. Di tingkat pusat komitmen juga dinyatakan oleh Bappenas untuk mengintegrasikan SAIK+/SIO Papua dengan pendataan registrasi sosial ekonomi melalui SEPAKAT, serta dari BPS berupa rekomendasi bagi SAIK+/SIO Papua sebagai data statistik sektoral daerah.

Pengalaman pelaksanaan kegiatan oleh Tim Transisi memberikan pembelajaran untuk pelaksanaan program-program pembangunan di masa datang. Kombinasi antara pemahaman tim pelaksana, strategi penguatan kapasitas dan pemahaman pemerintah daerah atas sebuah kebijakan, bersama-sama berkontribusi pada perubahan yang bermakna. Pemahaman tim pelaksana terhadap masalah, konteks politik ekonomi lokal, serta kemampuan membangun relasi, secara formal maupun informal, berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan program di daerah. Selain itu, dalam hal penguatan kapasitas pemerintah daerah, pendekatan bimbingan teknis yang menggunakan teknik simulasi terindikasi efektif dalam membangun kapasitas dan patut digunakan sebagai model penyelenggaraan program peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Termasuk pentingnya sosialisasi yang lebih luas sampai dengan kabupaten/kota, terutama terkait kebijakan baru yang perubahannya cukup mendasar seperti halnya kebijakan seputar tata kelola otonomi khusus.

Pada akhir laporan ini, **Tim Transisi merekomendasikan agar Program SKALA terus melanjutkan dukungan penguatan kelembagaan dan tata kelola kebijakan otonomi khusus dan operasionalisasi sistem informasi berbasis lokal**, dan melanjutkan kolaborasi terkait kedua ruang lingkup tersebut bersama Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas serta Pemerintah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.

Dalam aspek pengelolaan keuangan Fase Transisi sampai berakhirnya masa Hibah pada tanggal 31 Desember 2022, Tim Transisi telah menggunakan dana sebesar Rp 9.586.362.433 atau 98.9% dari dana hibah yang dianggarkan.



Latar Belakang

Papua, Papua Barat dan Aceh merupakan provinsi dengan status otonomi khusus (Otsus), sejak 2001 untuk provinsi-provinsi Papua dan Papua Barat, dan 2006 untuk provinsi Aceh. Dengan pemberian status Otsus maka ketiga provinsi tersebut mendapatkan kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan, yang disertai dengan diberikannya tambahan anggaran signifikan yang ditransfer sebagai dana Otsus, dengan tujuan utama peningkatan pembangunan di daerah. Transfer dana Otsus menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi ketiga provinsi ini dan berkontribusi terhadap lebih dari separuh anggaran pemerintah provinsi. Revisi Undang-undang Otsus untuk Papua (menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2021) telah memperpanjang pengalokasian dana Otsus untuk 20 tahun lagi hingga tahun 2042, dengan alokasi dana otsus yang meningkat dari 2% menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Sementara itu, pendanaan Otsus dikelola secara berbeda di Aceh dibandingkan dengan Papua dan Papua Barat. Selama 15 tahun terakhir, Aceh telah menerima 2% dari dana alokasi umum nasional melalui pengaturan dana Otsus, namun setelah tahun 2022 alokasi dana otsus Aceh akan turun menjadi hanya 1% dari total dana alokasi umum nasional. Perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya dana Otsus, hingga separuh, mulai 2022 (hingga pengaturan Otsus berakhir pada 2027) dan akan berdampak secara signifikan bagi Provinsi Aceh, karena selama ini dana otsus berkontribusi rata-rata sebanyak 62% dari total penerimaan provinsi.

Meskipun ketiga provinsi telah menerima tambahan anggaran dalam bentuk transfer dana Otsus, tantangan pembangunan tetap besar. Ketiga provinsi ini dikategorikan sebagai provinsi miskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan sebagai berikut: 26,56% (Papua), 21,33% (Papua Barat) dan 14,64% (Aceh) berdasarkan Badan Pusat Statistik per Maret 2022. Walaupun ada perbaikan bertahap, Papua tetap menjadi provinsi termiskin di Indonesia dan Aceh tetap menjadi provinsi termiskin di Sumatera.

Papua dan Papua Barat juga mendapatkan peringkat sangat rendah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi Papua Barat menempati peringkat ke-33 (dengan IPM 65,26) dan Provinsi Papua menempati peringkat ke-34 (dengan IPM 60,62) dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara, Aceh memiliki IPM (72,18) yang hampir setara dengan tingkat nasional (72,29). Selain itu, kesenjangan gender dalam kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi - berada pada 40 persen terbawah - sangat parah di Papua dan Papua Barat, terutama untuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Kedua provinsi ini juga memiliki nilai Indeks Pembangunan Gender terendah di Indonesia, yang berarti tidak hanya kondisi penduduk di Papua dan Papua Barat lebih buruk daripada daerah lain di Indonesia, tetapi juga perempuan lebih buruk dibandingkan laki-laki di daerah yang sama.

Pemerintah Australia, terutama melalui program KOMPAK, telah membantu Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan di Aceh, Papua dan Papua Barat. Sejak tahun 2015, KOMPAK telah mendukung pemerintah Aceh dalam peningkatan penyediaan layanan dasar (terutama di bidang kesehatan dan pencatatan sipil). KOMPAK bekerja dengan

seluruh tingkatan pemerintahan, memulai pendekatan pilot, dan mempengaruhi perumusan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Di Aceh, KOMPAK telah membantu perluasan cakupan pencatatan sipil yang memungkinkan pembukaan akses layanan dasar yang tersedia di provinsi ke lebih banyak orang. KOMPAK juga telah membantu pemerintah Aceh untuk menerapkan e-budgeting untuk meningkatkan dan menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran di berbagai instansi. Hal ini merupakan rekomendasi dari kajian bersama Pemerintah Provinsi Aceh dengan Kementerian Keuangan tentang pengaturan dana Otsus yang didukung KOMPAK dari 2018 hingga 2019 untuk melihat cara peningkatan efektivitas pendanaan Otsus di Aceh.

KOMPAK juga telah bekerja dalam peningkatan penyediaan layanan dasar di Papua dan Papua Barat sejak 2016. Fokus utama dari pekerjaan KOMPAK adalah untuk mendukung seluruh tingkat pemerintahan dalam mengelola data Otsus secara lebih baik, meningkatkan sistem informasi kampung dan kecamatan - Sistem Informasi dan Administrasi Kampung (SAIK+) dan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua), menerapkan standar layanan kesehatan dan pendidikan dalam perencanaan dan pembangunan, serta mendukung penggunaan data perlindungan sosial untuk penentuan sasaran program perlindungan sosial yang lebih tepat. KOMPAK juga membantu Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam implementasi undang-undang Otsus yang telah direvisi, terutama untuk lebih menyelaraskan penggunaan dana dengan prioritas pembangunan serta meningkatkan proses tata kelola, manajemen dan transparansi.

Pengelolaan transisi dari KOMPAK ke program baru, bernama SKALA, pada periode Juli 2022 hingga Desember 2022, merupakan hal yang penting bagi Pemerintah Australia, melalui DFAT, untuk memastikan hubungan baik dan kerja sama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian (Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas), dan pemerintah provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat tetap terjaga dan berjalan baik. Dengan demikian dukungan strategis terkait Otsus dan percepatan pembangunan di ketiga provinsi ini berjalan secara berkesinambungan. DFAT telah bermitra dengan BaKTI untuk mengelola keterlibatan dan dukungan di atas melalui pengaturan hibah pada periode transisi ini.



Tujuan dan Sasaran Tim Transisi

Untuk menjembatani periode transisi, antara berakhirnya Program KOMPAK pada 30 Juni 2022 hingga dimulainya Program SKALA pada akhir 2022, DFAT mengutamakan pentingnya mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh, melalui keberlanjutan dukungan strategis terkait Otsus dan prioritas pembangunan utama lainnya.

Dukungan Tim Transisi akan berkontribusi pada dua tujuan pembangunan, yaitu:

- 1 Meningkatkan efektivitas belanja Pemerintah Indonesia, dan;
- 2 Mengatasi masalah pembangunan utama di 3 (tiga) provinsi Otsus Papua, Papua Barat dan Aceh.



Strategi Pelaksanaan dan Implementasi

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang menjadi prioritas atau fokus dalam periode transisi, yaitu:

- 1 Menjaga hubungan baik dan kepercayaan dari Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kegiatan ini mencakup penyediaan masukan teknis untuk isu perencanaan penganggaran dan otonomi khusus.
- 2 Menjaga hubungan baik dan kepercayaan pemerintah daerah khususnya Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh. Kegiatan ini mencakup penyediaan dukungan teknis kepada Bappeda, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah terkait isu perencanaan, penganggaran dan otonomi khusus.
- 3 Menjaga keberlanjutan dukungan teknis untuk SAIK+ dan SIO Papua. Kegiatan ini mencakup penyediaan dukungan teknis berupa menyediakan masukan teknis untuk implementasi dan replikasi SAIK+ dan SIO Papua.
- 4 Menjaga hubungan baik dan kepercayaan Pemerintah Provinsi Aceh. Kegiatan ini mencakup penyediaan dukungan teknis berupa menyediakan masukan kepada Bappeda, Sekretaris Daerah (Setda), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil yang diharapkan di masa transisi melalui empat kegiatan prioritas tersebut, Tim Transisi menerapkan dua strategi utama, yaitu: ① mengembangkan rencana kerja yang adaptif berdasarkan pembelajaran dari program-program DFAT sebelumnya, termasuk KOMPAK dan ② memberikan dukungan teknis kepada mitra pemerintah yang berpotensi memberi daya ungkit (*by design*), sambil pada saat yang sama memanfaatkan peluang yang ada (*by opportunity*) dan/atau berdasarkan permintaan dari Pemerintah Indonesia pada isu-isu spesifik dari kegiatan tersebut (*by demand*). Penyusunan rencana kerja dilakukan bersama DFAT untuk memastikan kesesuaian dengan maksud dan tujuan yang diharapkan dari dukungan Tim Transisi. Strategi ini diimplementasikan dalam rangka memastikan kepercayaan pemerintah yang terjaga dengan baik, sekaligus untuk membangun momentum bagi pelaksanaan program SKALA ke depan.

Tim Transisi menjabarkan kedua strategi tersebut melalui pembentukan tim kerja yang terdiri dari tenaga ahli dengan keahlian yang spesifik dengan peran dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Tenaga Ahli dengan keahlian spesifik diantaranya terkait dengan bidang manajemen program, bidang otonomi khusus, bidang tata kelola pemerintahan baik pusat maupun daerah, bidang pengelolaan keuangan publik dan transfer fiskal, bidang sistem data dan informasi, bidang tata kelola desa dan bidang pengembangan kapasitas. Untuk memudahkan pengelolaan, berbagai tenaga ahli ini dikelompokkan ke

dalam tiga kelompok keahlian. Kelompok keahlian pertama berfokus pada penyediaan dukungan teknis untuk isu tata kelola perencanaan penganggaran otonomi khusus dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas (Tim PFM). Kelompok keahlian kedua berfokus pada penyediaan dukungan teknis untuk adopsi dan replikasi sistem informasi lokal (Tim LOGIS/*Locally Generated Information System*). Adapun kelompok keahlian ketiga (Tim Provinsi) bertugas untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah dan juga mengatur area dukungan teknis untuk pemerintah daerah bersama dengan Tim PFM dan Tim LOGIS.

Tim ini bekerja secara kolaboratif dengan mensinergikan keahlian sesuai dengan peran dan fungsi untuk mendukung kegiatan, baik di pusat (lintas K/L) maupun di daerah, khususnya di Aceh, Papua dan Papua Barat. Cara kerja ini terbukti efektif dalam mengelola berbagai masukan teknis untuk isu yang menjadi prioritas. Sebagai contoh, dalam mendukung kegiatan adopsi dan perluasan pemanfaatan sistem informasi dan data, selain masukan teknis terkait tata kelola penyediaan dan pemanfaatan data yang disediakan oleh Tim LOGIS, Tim PFM juga memberikan masukan teknis terkait perencanaan dan penganggaran untuk memastikan keberlanjutan adopsi dan perluasan. Sementara Tim Provinsi memperkuat advokasi untuk pemerintah daerah yang didukung oleh Tim LOGIS dan Tim PFM.

Tim Transisi memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia melalui berbagai input teknis berupa analisis, rekomendasi, transfer pengetahuan dan peningkatan keterampilan. Tim Transisi juga terus memantau perkembangan dinamika politik yang berdampak langsung pada kegiatan transisi. Sebagai contoh, Tim Transisi menyesuaikan prioritas dukungan dengan perkembangan ketersediaan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk perluasan pemanfaatan sistem informasi dan data di daerah dan momentum pelaksanaan registrasi sosial ekonomi (REGSOSEK). Contoh lain, Tim Transisi menyesuaikan prioritas dukungan dengan perkembangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.

Keseluruhan strategi implementasi periode transisi ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan pemerintah Indonesia baik di pusat, khususnya Kemendagri, Bappenas dan Kemenkeu, serta pemerintah daerah, khususnya Papua, Papua Barat dan Aceh untuk selanjutnya dapat digunakan dalam pelaksanaan program SKALA.



Hasil Kunci Transisi Program SKALA

Melalui dukungan Tim Transisi, hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat (Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas) serta Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh, tetap terus terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya komitmen Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atas kegiatan yang dilaksanakan bersama Tim Transisi.

5.1 Dukungan Teknis Penguatan Kebijakan Otonomi Khusus di Tingkat Nasional

5.1.1 Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2021 tentang tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PP No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Selanjutnya, PP 107 Tahun 2021 tersebut diturunkan lagi menjadi peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus.

Untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, maka pada bulan Juli 2022 **Tim Transisi telah mendukung DJPK memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas dalam menyusun mekanisme dan template Rencana Anggaran dan Program (RAP) sesuai dengan PMK No. 76 Tahun 2022. Template tersebut telah diintegrasikan ke dalam aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus.** Aplikasi SIKD Otsus ini telah diujicobakan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat pada tanggal 11-12 September 2022. Dalam forum tersebut Tim Transisi juga berbagi contoh penyusunan RAP untuk kegiatan Pedoman Penganggaran SAIK+ Papua Barat dan RAP untuk Panduan Penganggaran Bidang Pendidikan.

Terkait dengan perencanaan dan penganggaran dana otsus, Tim Transisi telah memfasilitasi dan memberikan masukan teknis dalam diskusi antar Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kemendagri dengan Pemprov Papua dan K/L terkait finalisasi kodifikasi dan nomenklatur Otsus Papua sesuai dengan PP No. 106

Tahun 2021. Input dari Tim Transisi telah diakomodasi dalam SE Kemendagri No. 900/6325/SJ yang diterbitkan pada 28 September 2022, khususnya tentang:

- a Beasiswa guru;
- b Bepindahnya kewenangan pengelolaan SMA dari provinsi ke kabupaten;
- c Sekolah berasrama;
- d Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK); serta
- e SIO Papua dan SAIK+.

Adanya kodefikasi dan nomenklatur khusus otonomi khusus di tanah Papua ini merupakan landasan strategis dan kritical mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk menganggarkan berbagai kegiatan strategis utama dalam APBD yang akan menjawab permasalahan pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua. Saat ini, melalui RAP, sedikitnya 8 kabupaten di Provinsi Papua telah menganggarkan untuk kegiatan SIO Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah menganggarkan untuk kegiatan SAIK+ sebagai prioritas untuk tahun 2023.

Input teknis dari Tim Transisi tentang pemutakhiran kodefikasi dan nomenklatur Otsus Papua telah diakomodasi dalam SE Kemendagri No.900/6325/SJ. Hal ini merupakan langkah strategis untuk perbaikan proses perencanaan dan penganggaran Otonomi Khusus di Tanah Papua [28/09/22]


KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 September 2022

Nomor : 900/6325/SJ
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Hasil Inventarisasi Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021

Yth. 1. Gubernur Papua
2. Gubernur Papua Barat
3. Bupati/Wali Kota se-Papua dan Papua Barat

di -
Tempat

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pemutakhiran

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

 Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

5.1.2 Pelaporan

Tim Transisi telah memberikan input teknis kepada DJPK pada bulan November 2022 dalam rangka penyusunan instrumen pelaporan Dana Otsus sesuai dengan PMK Nomor 76 Tahun 2022 dengan provinsi Aceh sebagai lokasi percontohan. DJPK bersama dengan Tim SKALA dan Tim Transisi SKALA menghasilkan instrumen laporan tahunan pemanfaatan Dana Otsus. Instrumen ini telah disosialisasikan sekaligus digunakan dalam Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota pada tanggal 1-2 Desember 2022. Laporan ini akan digunakan sebagai syarat pencairan Dana Otsus Tahap 1 pada tahun anggaran (TA) 2023.

UU Nomor 2 Tahun 2021 memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam pembagian dan pengelolaan dana Otsus untuk Tanah Papua. Serta, mensyaratkan pemerintah provinsi dan kabupaten di Tanah Papua untuk menyiapkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dalam waktu singkat bersamaan dengan implementasi Otsus tahun berjalan. Hal ini tidak mudah dilakukan mengingat perbedaan yang cukup signifikan antara UU Otsus sebelumnya dan yang terbaru, serta kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten yang masih harus terus dibangun.



PANDUAN PELAKSANAAN MUSRENBANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

Panduan Pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus berperan penting dalam memastikan proses perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran di Tanah Papua, baik di level provinsi, kabupaten/kota, distrik maupun kampung/kelurahan.

5.1.3 Panduan

Setelah template RAP dan Laporan tahunan dibuat, secara paralel, Tim Transisi bersama Bappenas telah menginisiasi penyusunan panduan musyawarah perencanaan pembangunan Otsus (Musrenbangsus) Tanah Papua. Draft Final Panduan Musrenbang Otsus Provinsi Papua telah dibahas bersama Bappenas. Dukungan ini penting untuk memastikan proses perencanaan pembangunan yang efektif dan memastikan partisipasi OAP di setiap tingkatan perencanaan mulai dari kampung. Panduan ini merupakan salah satu mandat dari PMK Nomor 76 Tahun 2022 yang belum pernah ada sebelumnya.

Selain sosialisasi implementasi PMK No. 76 Tahun 2022 bersama Kemenkeu di Papua, Papua Barat dan Aceh, forum yang difasilitasi oleh Tim Transisi juga telah mengidentifikasi kebutuhan untuk pelatihan teknis lebih lanjut, termasuk kebutuhan penyusunan panduan teknis untuk mendukung penguatan kapasitas pemerintah provinsi induk maupun daerah otonomi baru dalam pelaksanaan tata kelola Otsus baru yang lebih baik, transparan, terukur, dan akuntabel.

5.2 Dukungan Teknis Penguatan Kebijakan Otonomi Khusus di Tingkat Daerah

5.2.1 Provinsi Aceh

Sejalan dengan dukungan di tingkat pusat terkait penguatan kebijakan Otonomi Khusus di Pusat, Tim Transisi telah menghasilkan Laporan Kajian Peranan Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Aceh beserta rekomendasi teknis perbaikan tata kelola otsus Aceh. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan, pada tanggal 9 Agustus 2022 melalui surat nomor 188/123149 kepada Presiden RI, Pejabat Gubernur Aceh telah



FGD Kajian Identifikasi Potensi Peningkatan Sumber Pendapatan dan Pembiayaan Provinsi Aceh merupakan bagian dari upaya perbaikan sistem dan prosedur dalam mengoptimalkan pendapatan dan pengelolaan PAD Aceh (15-16/09/2022)



FGD Hasil Kajian Tata Kelola Dana Otsus, Peningkatan Pendapatan Aceh, Perubahan SOTK dan Pembentukan Dana Abadi Daerah bersama pejabat kunci Provinsi Aceh merupakan langkah strategis untuk mencapai pengelolaan keuangan publik yang lebih baik (1-2/12/2022)

mengusulkan amandemen alokasi dana otonomi khusus Aceh dari 2% menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU). Selanjutnya masukan dari Pemerintah Aceh tersebut dijadikan sebagai masukan bagi K/L terkait dalam persiapan pembahasan perubahan UU Pemerintah Aceh yang akan datang. K/L juga memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan terhadap kajian tersebut.

Tim Transisi juga telah menghasilkan draft kajian Identifikasi Potensi Peningkatan Sumber Pendapatan dan Pembiayaan Provinsi Aceh dan kajian naskah akademis Qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh dan Penataan Ulang SOTK Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Temuan dan hasil kajian telah didiskusikan bersama pejabat kunci di tingkat provinsi. Kajian ini merupakan bagian dari upaya perbaikan sistem dan prosedur sehingga lebih mengoptimalkan pendapatan dan pengelolaan PAD Aceh. Hasil kajian dana abadi pendidikan Aceh merupakan langkah penting bagi Pemda Aceh untuk menerjemahkan kebijakan terbaru terkait UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Sebanyak 229 peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Aceh (terdiri dari 171 laki-laki dan 58 perempuan) telah mendapatkan pelatihan penyusunan Laporan Pelaksanaan, Pengelolaan, Penerimaan Otsus melalui fasilitasi bimbingan teknis sesuai dengan PMK No. 76 Tahun 2022. . Diharapkan dengan adanya format pelaporan baru bisa diketahui output yang dihasilkan dari dana otsus dan sarat salur tahap 1 Otsus 2023 bisa terpenuhi.

5.2.2 Provinsi Papua

Di Papua, Tim Transisi memberikan input teknis dan fasilitasi penyiapan panduan penganggaran SIO Papua dan penyediaan guru dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) sesuai PMK No. 76 Tahun 2022 dan selanjutnya disosialisasikan dalam bimbingan teknis simulatif PMK No. 76 Tahun 2022. Tim Transisi telah mendorong penganggaran bagi implementasi SIO Papua di 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Papua.



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Otsus Papua yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat (11-12/09/2022)



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Otsus Papua yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat (11-12/09/2022)

Sebanyak 222 peserta (terdiri dari 178 laki-laki dan 46 perempuan) telah dilatih untuk dapat menyusun RAP dan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus untuk menginput RAP untuk kemudian dilakukan review lebih lanjut oleh provinsi dan lintas K/L di Pusat. Dukungan Transisi Program SKALA dalam sosialisasi dan bimbingan teknis PMK No. 76 Tahun 2022, dilakukan melalui pendekatan simulasi dan praktek yang dinilai efektif dalam memberikan penguatan kapasitas kepada peserta. Dari forum tersebut juga teridentifikasi bahwa masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan staf Perangkat Daerah dalam penggunaan SIKD Otsus. Untuk itu dengan input teknis dari Transisi Program SKALA, beberapa kabupaten/kota juga telah mengalokasikan anggaran dalam APBD guna peningkatan kapasitas lebih lanjut.

Transisi Program SKALA juga telah memberikan input teknis penyiapan simulasi penerimaan Provinsi Papua untuk penyusunan RAPBD 2023. Hal ini penting dilakukan mengingat pemekaran provinsi baru akan berdampak pada pengalokasian anggaran

5.2.3 Provinsi Papua Barat

Transisi Program SKALA juga memberikan input teknis dan fasilitasi terkait peningkatan kemampuan OPD provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat terkait dengan penyusunan RAP sesuai PMK No. 76 Tahun 2022. **Sebanyak 80 peserta (60 laki-laki dan 20 perempuan) telah dilatih untuk dapat menyusun RAP dan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus untuk menginput RAP untuk kemudian dilakukan review lebih lanjut oleh provinsi dan lintas K/L di Pusat.**

Tim Transisi telah mendorong penganggaran bagi implementasi SAIK+ di tingkat provinsi dan 13 kabupaten/kota. Advokasi Tim Transisi dengan cara memberikan contoh dan memfasilitasi simulasi dan praktek penyusunan RAP terkait SAIK+ dan adanya kebijakan Kemendagri terkait nomenklatur khusus, Pemerintah Provinsi telah mewajibkan semua kabupaten/kota untuk menganggarkan kegiatan SAIK+.

Dukungan monitoring pelaksanaan PROSPPEK telah menghasilkan pemetaan kemajuan program di tingkat kabupaten/kota, distrik dan kampung serta rekomendasi lainnya dalam implementasi Prioritas Program Strategis Bersama (PPSB). PROSPPEK adalah program strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat yang desain dan pelaksanaannya telah didukung oleh DFAT melalui KOMPAK sejak tahun 2019. Dengan perubahan kebijakan otonomi khusus, pemerintah provinsi perlu menyesuaikan desain program dan mendorong keberlanjutan implementasinya di kabupaten/kota. Salah satu hasil dari monitoring menunjukkan bahwa terdapat permintaan cukup besar dari pemerintah kampung/kelurahan dan distrik untuk melanjutkan penyaluran dana PROSPPEK. Pengelolaan Dana PROSPPEK tahun anggaran 2020 dan 2021 terbukti berperan dalam meningkatkan pelayanan bidang adminduk, kesehatan dan pendidikan di kampung/kelurahan, serta mengisi gap capaian pembangunan kampung yang bersumber dari Dana Kampung. Meskipun demikian, implementasi PROSPPEK masih membutuhkan dukungan pendampingan di

level distrik dan kampung, terutama karena belum terlaksananya sinergi pembangunan kampung dengan unit layanan (sekolah dan puskesmas), serta belum kuatnya kelembagaan di tingkat distrik.



Monitoring PROSPPEK OTSUS di tingkat kabupaten/kota, distrik dan kampung menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola dan pengembangan PROSPPEK dan SAIK+ sebagai bagian Prioritas Program Strategis Bersama Provinsi dan Kab/Kota (20-25/11/2022)



Rakor SEKBER PROSPPEK Kabupaten Manokwari Selatan bersama para Kepala Distrik membahas mekanisme dan tata kelola penganggaran Dana Otonomi Khusus untuk percepatan pendataan OAP (02/12/2022)

Tim Transisi telah memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Peningkatan IPM. Draft awal ini selanjutnya akan dibahas oleh perangkat daerah teknis di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota pada tahun 2023. Peraturan Gubernur tentang Percepatan IPM tersebut akan menjadi dasar pembagian peran dan kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota hingga Kampung dalam mencapai target capaian dan sasaran



Monitoring PROSPPEK OTSUS di tingkat kabupaten/kota, distrik dan kampung menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola dan pengembangan PROSPPEK dan SAIK+ sebagai bagian Prioritas Program Strategis Bersama Provinsi dan Kab/Kota (20-25/11/2022)



Rakor SEKBER PROSPPEK Kabupaten Manokwari Selatan bersama para Kepala Distrik membahas mekanisme dan tata kelola penganggaran Dana Otonomi Khusus untuk percepatan pendataan OAP (02/12/2022)

program percepatan peningkatan IPM. Dalam hal ini, Tim Transisi mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kampung agar mampu mengelola keuangan publik dengan lebih baik untuk meningkatkan layanan dasar yang sesuai Standar Pelayanan Minimal. Hal ini merupakan langkah strategis karena Tim Transisi juga dapat mengadvokasi penguatan pemanfaatan bukti/data sektoral dan SAIK+ untuk menentukan target capaian dan sasaran program percepatan peningkatan IPM. Dengan pemanfaatan data-data tersebut maka kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat rentan baik OAP maupun non-OAP juga dapat diakomodasi dalam penetapan rencana dan anggaran layanan dasar.

5.3 Dukungan Teknis Adopsi dan Replikasi Sistem Informasi Berbasis Lokal (LOGIS)

5.3.1 Provinsi Aceh

Tim Transisi telah menghasilkan basis pelembagaan SIGAP yang diintegrasikan ke dalam perencanaan program pemerintah Aceh dalam jangka menengah. Dengan dukungan Tim Transisi telah dihasilkan Peta Jalan SIGAP. Dan selanjutnya dengan sistem *bottom-up data processing*, SIGAP akan menjadi platform perencanaan berbasis data dan menjadi bagian dari desain utama Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT). Peta Jalan merupakan bagian tidak terpisahkan dari struktur tata kelola SIGAP yang menyediakan pondasi bagi perbaikan sistem penyediaan data yang akan melibatkan lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan dan gampong sebagai unit terdepan dalam mengelola termasuk pemutakhiran dan memanfaatkan data.



Launching SIGAP Kota Subulussalam merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis data dan informasi gampong (27/08/2022)



Finalisasi Rancangan Peta Jalan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Provinsi Aceh sebagai pondasi perbaikan sistem penyediaan data secara kolaboratif yang melibatkan lintas SKPA, pemangku kepentingan dan gampong (1-2/12/2022)

360 orang operator tingkat gampong di Kab Aceh Barat, Simeuleu, dan Nagan Raya telah dilatih dalam pengoperasian aplikasi SIGAP yang merupakan hasil input teknis Tim Transisi kepada Pemerintah Provinsi, khususnya DPMG dan Kominsa. Kedua Perangkat Daerah (PD) ini adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam memastikan penggunaan SIGAP di seluruh gampong di Provinsi Aceh. Dengan tambahan jumlah operator terlatih ini, total gampong yang telah menerima pelatihan SIGAP menjadi 2.567 gampong di 10 kabupaten.

Tidak hanya komitmen Pemerintah Aceh yang meningkat, dukungan dari berbagai pihak juga mengalir, diantaranya dukungan dari legislatif (DPRA) Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dukungan ini diwujudkan dengan memberikan alokasi dana aspirasi (pokok pikiran) untuk pelaksanaan evaluasi mandiri pemanfaatan SIGAP di Kabupaten Bireuen. Selain itu DPRA juga mendukung finalisasi Peta Jalan SIGAP yang siap mulai dilaksanakan mulai tahun 2023. Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Informasi, Bappenas, serta BPS Provinsi Aceh juga telah memberikan komitmen untuk bekerja sama mendorong peningkatan kualitas data, khususnya pemutakhiran data registrasi sosial ekonomi yang rencananya akan diintegrasikan melalui SIPD-SEPAKAT dengan mendukung SIGAP sebagai bagian dari aplikasi umum, sesuai prinsip Satu Data dan standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan akan menjadi platform utama untuk pemutakhiran REGSOSEK di Aceh.

5.3.2 Provinsi Papua

Dukungan Tim Transisi untuk penguatan SIO Papua telah menghasilkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi untuk mendorong perluasan kedua sistem tersebut di kabupaten/kota. Sebelum peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB), 29 kabupaten/kota telah berkomitmen untuk mereplikasi SIO Papua. SIO Papua akan menjadi bagian dari sistem informasi Papua Integrasi Satu Data (PAITUA) yang menjadi platform bagi pakai data di tingkat provinsi. Tim Transisi bersama Pemerintah Provinsi Papua juga memfasilitasi penguatan Forum Satu Data di Kabupaten Waropen, Supiori, Biak dan Yapen dimana SIO Papua akan menjadi backbone utama memperkuat penyediaan data dalam tata



Penguatan Forum Satu Data Kabupaten Waropen, Supiori, Biak Numfor dan Kepulauan Yapen merupakan langkah strategis pelembagaan SIO Papua sebagai backbone utama penyediaan data terpilah OAP dan non-OAP (13/12/2022)

kelola Satu Data tersebut. Secara khusus di Supiori, Biak, Asmat dan Nabire telah disepakati penguatan kelembagaan pengelola SIO Papua di tingkat kabupaten, distrik dan kampung. Penguatan kelembagaan ini juga mencakup penganggaran SIO Papua di Tahun 2023.

Selain meningkatnya kesadaran dan kepemilikan dari pemerintah daerah, Bappenas dan BPS juga telah berkomitmen untuk mendukung perluasan SIO Papua. Bappenas lebih lanjut berkomitmen untuk mengintegrasikan SIO Papua dengan pendataan registrasi sosial ekonomi melalui SEPAKAT. Untuk ini Tim Transisi telah memberikan input teknis dan assesment di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Jayapura serta pertemuan di tingkat provinsi. Selanjutnya, telah disepakati bersama bahwa SIO Papua menjadi platform tingkat daerah di Provinsi Papua yang akan terhubung dengan pusat dalam pemutakhiran data tentang kondisi sosial ekonomi baik OAP maupun Non-OAP (REGSOSEK Papua). Dukungan kuat juga telah diberikan oleh BPS dengan memberikan rekomendasi bagi SIO Papua yang mencakup kesesuaian metodologi, konsep dan definisi dan referensi waktu, dan dinyatakan telah memenuhi kaidah statistik dan dapat diakui sebagai pengumpulan data statistik sektoral daerah. Keterlibatan BPS sebagai Pembina Data merupakan wujud implementasi Prinsip Satu Data Indonesia secara terstruktur.

Dengan meningkatnya kesadaran dan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas SIO Papua melalui komitmen penyediaan anggaran, maka perlu disiapkan mekanisme perluasan yang lebih sistematis, *from household to factory system*. Tim Transisi Program SKALA telah melatih 13 orang pelatih provinsi yang terdiri dari Bappeda, Diskominfo, DPMK, BPS, Dukcapil dan pendamping non-pemerintah yang selama masa transisi telah melatih 101 kader kampung di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Supiori. Pelatihan kepada kader kampung akan dilanjutkan di kabupaten-kabupaten lain di Papua dan juga di DOB sesuai kesiapan pemerintah daerah.

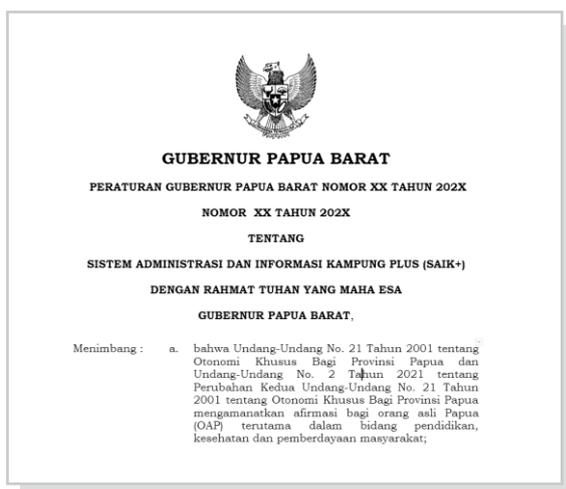
Sistem dan aplikasi SIO Papua secara bertahap telah berjalan stabil dan siap dialih kelolakan kepada pemerintah daerah. Tim Transisi Program SKALA telah mendukung pengembangan SIO Papua untuk dapat memenuhi standar keamanan sistem sesuai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan prinsip perlindungan data pribadi, yang secara bertahap akan dialihkan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaannya sesuai kesiapan.

Pemanfaatan hasil pengumpulan data dari tingkat kampung semakin bertambah dengan semakin luasnya penggunaan SIO Papua. Di Jayapura, pemanfaatan data SIO Papua yang dikaitkan dengan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada distrik/ kecamatan telah mendorong pemberian layanan adminduk yang lebih cepat dengan cakupan yang lebih luas.

5.3.3 Provinsi Papua Barat

Sejak tahun 2021, DFAT melalui program KOMPAK telah memberikan dukungan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperluas penggunaan SAIK+ secara luas di 13 kabupaten/kota.. Hingga akhir 2022, melalui Tim Transisi, pendataan telah mencakup 301.379 individu penduduk Papua Barat, atau sekitar 30% dari total populasi penduduk.

Melalui input teknis Tim Transisi, Pemerintah provinsi mendorong SAIK+ untuk menjadi salah satu program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan memanfaatkan dana otonomi khusus. Pemerintah Provinsi melalui BAPPEDA dan Dinas Kominfo juga telah menganggarkan kegiatan yang akan mendukung pengelolaan SAIK+ pada tahun 2023, diantaranya anggaran untuk penguatan tim Sekber Provinsi, pembiayaan programmer pengelola sistem, dan pembinaan kepada kabupaten/kota.



Peraturan Gubernur tentang SAIK+ akan menjadi dasar pembagian peran dan kewenangan baik lintas OPD di provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan SAIK+ melalui SEKBER.

Tim Transisi Bersama dengan Tim SKALA memberikan dukungan teknis melalui fasilitasi Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang SAIK+ sebagai langkah strategis pelembagaan SAIK+ secara kolaboratif di Papua Barat (14/12/2022)

Rancangan Peraturan Gubernur tentang SAIK+ yang akan menjadi dasar pembagian peran dan kewenangan, baik lintas OPD di provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan SAIK+ melalui Sekretariat Bersama telah diselesaikan. Sebagai bagian dari Sekretariat Bersama SAIK+, BPS Provinsi juga merekomendasikan SAIK+ sebagai salah satu platform statistik sektoral dasar dan BPS Provinsi turut terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan dan monitoring.

Komitmen dan keterlibatan langsung dari Pemerintah daerah kabupaten/kota juga semakin kuat. Tim Transisi telah melatih 13 orang pelatih provinsi yang selanjutnya telah melatih 53 kader kampung dan 30 administratur distrik. Pelatih terampil ini akan membantu perluasan SAIK+ di 4 kabupaten yaitu, Kaimana, Tambraw, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama yang telah menyiapkan anggaran dalam APBD TA 2023. Penyusunan anggaran merujuk pada BIMTEK PMK 76 yang difasilitasi Tim Transisi bersama DJPK.



Training of Trainers (ToT) dengan bobot simulasi >60% merupakan salah pendekatan efektif untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat



Rakor Evaluasi Pelaksanaan PROSPPEK Kaimana antara Pemda Kaimana, Kepala Distrik dan Kampung untuk mendorong percepatan pendataan SAIK+ (14-15/10/22)

Dukungan dari pemerintah pusat telah diberikan oleh Bappenas yang berkomitmen untuk mengintegrasikan data hasil pendataan REGSOSEK dengan SAIK+. Selanjutnya SAIK+ akan menjadi platform utama di Papua Barat untuk melakukan pemutakhiran REGSOSEK secara terpilah OAP dan Non OAP. Integrasi sistem telah disepakati pasca dukungan Transisi Program dalam memfasilitasi sinergi dan kolaborasi tersebut melalui serangkaian kegiatan asesmen lapangan, lokakarya tingkat provinsi dan diskusi-diskusi terkait.



Pemerintah Provinsi Papua Barat dan BPJS Kesehatan cabang Manokwari menandatangani berita acara serah terima data SAIK+ pada saat Workshop SEKBER SAIK+. Hal ini merupakan wujud konkret penggunaan data SAIK+ dalam meningkatkan jaminan kesehatan Orang Asli Papua (28-29/11/2022)



Pj. Bupati Maybrat membuka acara sosialisasi SAIK+ dan bersama Perangkat Daerah menandatangani komitmen untuk mencapai 100% cakupan pendataan SAIK+ (13/12/2022)

Sistem dan aplikasi SAIK+ secara bertahap telah berjalan stabil dan siap dialih kelolakan kepada Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Papua Barat. Tim Transisi telah mendukung pengembangan SAIK+ untuk dapat memenuhi standar keamanan sistem sesuai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan prinsip perlindungan data pribadi.

Pemanfaatan hasil pengumpulan data dari tingkat kampung semakin bertambah dengan semakin meluasnya penggunaan SAIK+. Tim Transisi telah memfasilitasi pemadanan data hasil pengumpulan SAIK+ dan telah diserahkan kepada BPJS Kesehatan untuk selanjutnya digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Orang Asli Papua.

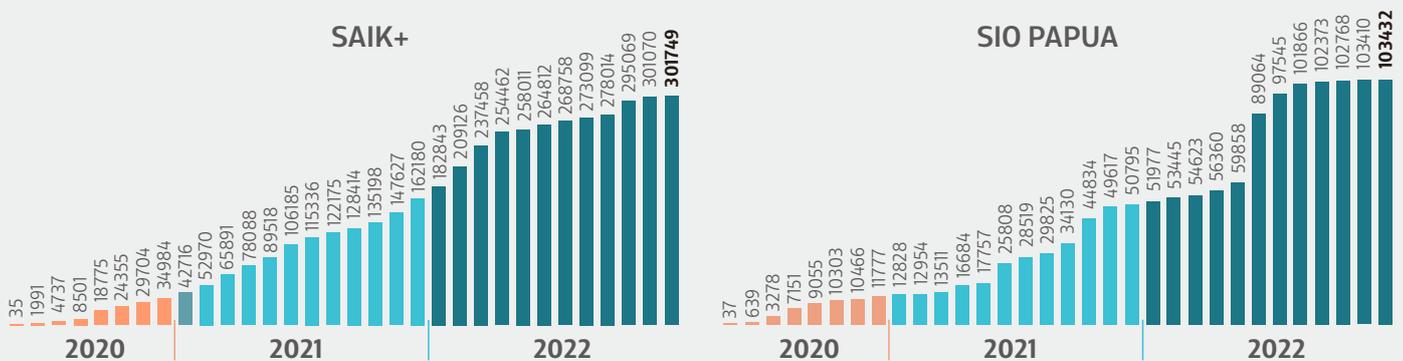
5.3.3 Perbandingan Kemajuan SIO Papua dan SAIK+

Aplikasi SAIK+ dan SIO Papua menyediakan data sosial ekonomi individu dan keluarga yang terpilah gender, suku (OAP dan non-OAP) serta usia. SAIK+ dan SIO Papua juga menyediakan informasi kepemilikan NIK dan dokumen kependudukan, keterangan disabilitas individu, keterangan penerima bantuan sosial individu dan keluarga, tingkat pendidikan individu dan partisipasi sekolah, serta keterangan perumahan keluarga. SAIK+ dan SIO Papua menyediakan data dasar yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor untuk perencanaan dan penganggaran berbasis bukti di tingkat desa hingga provinsi. Berikut adalah gambaran kemajuan hasil pendataan SAIK+ dan SIO Papua.

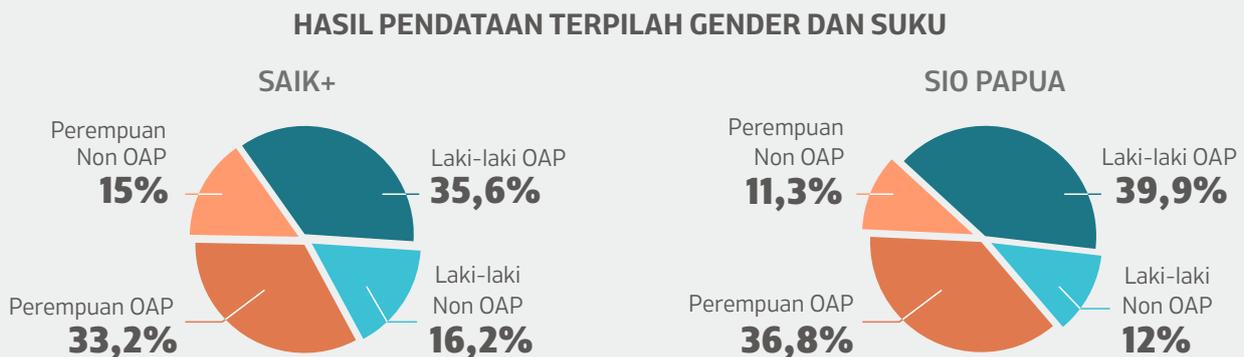
TABEL 1 PROGRESS PENDATAAN SAIK+ DAN SIO PAPUA
(PER 6 DESEMBER 2022)

Pendataan	Progress terdata (jiwa)			Kader Kampung		
	OAP	Non-OAP	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
SAIK+	207.690	94.059	301.749	1.199	571	1.770
SIO Papua	79.374	24.058	103.432	216	40	256

GRAFIK 1 PROGRESS PENDATAAN SAIK+ DAN SIO PAPUA 2020-2022 (JIWA)
(PER 6 DESEMBER 2022)



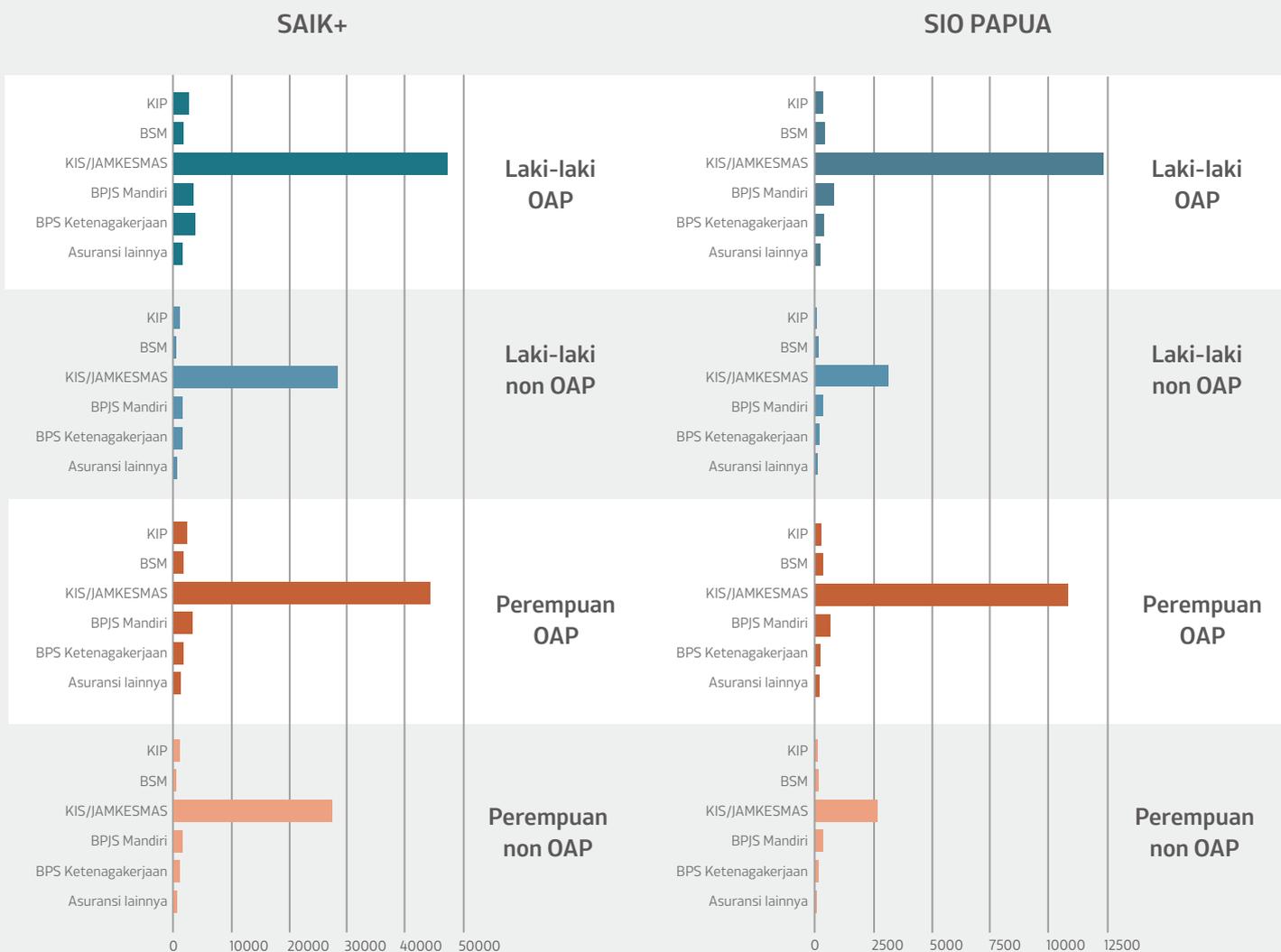
GRAFIK 2 ANALISIS HASIL PENDATAAN TERPILAH SAIK+ DAN SIO PAPUA TERPILAH GENDER & SUKU
(PER 6 DESEMBER 2022)



HASIL PENDATAAN TERPILAH KEPEMILIKAN NIK

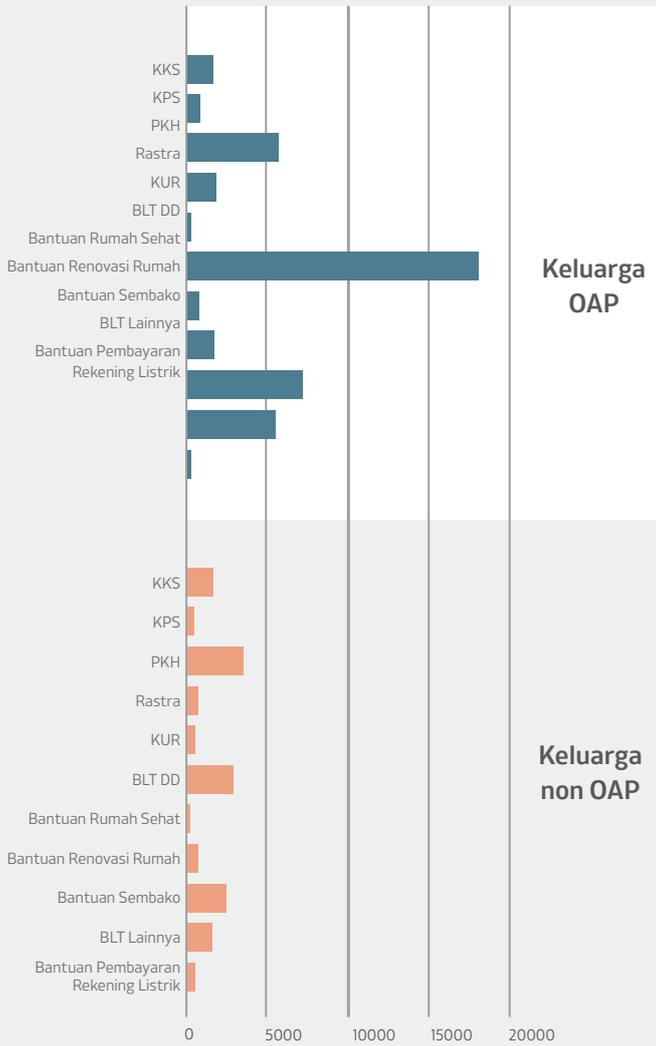


HASIL PENDATAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL INDIVIDU

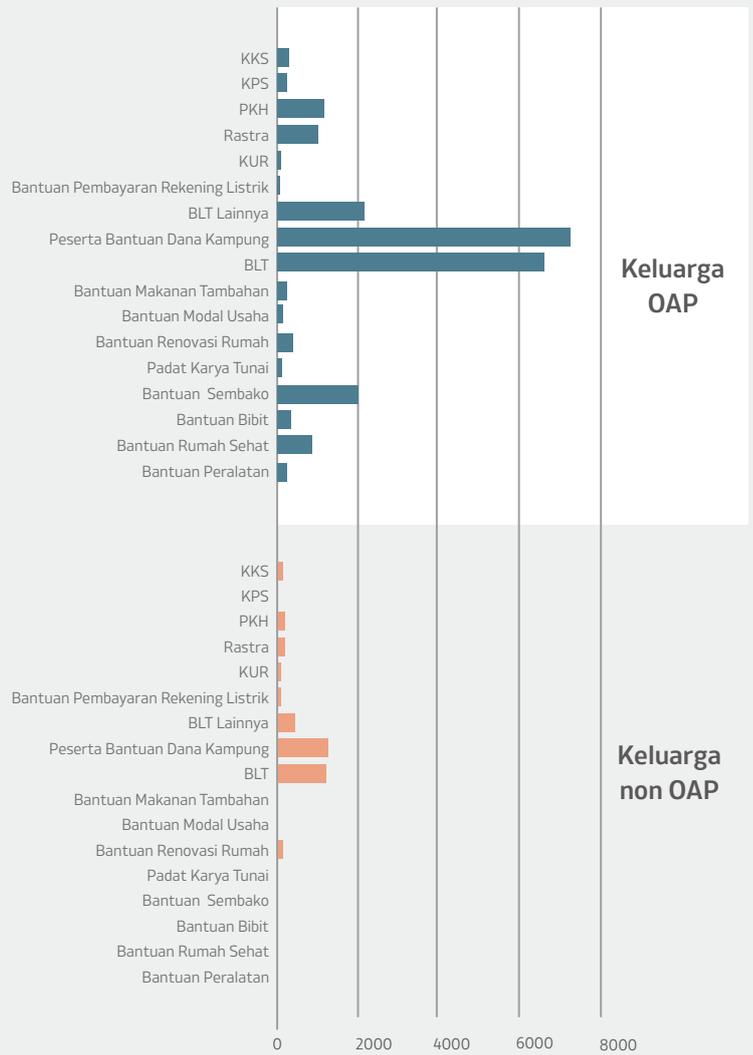


HASIL PENDATAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KELUARGA

SAIK+



SIO PAPUA



Sumber: Aplikasi SAIK+ dan SIO Papua (diolah)



6

Pembelajaran, Tantangan, dan Adaptasi

6.1 Pembelajaran

Pembelajaran penting dari implementasi Transisi Program SKALA adalah bahwa analisis aktor pemangku kepentingan di berbagai level, baik pemerintah maupun non-pemerintah, pemahaman atas masalah dan konteks politik ekonomi, serta kemampuan membangun relasi atau jejaring formal dan informal merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki tim kerja program dalam memfasilitasi berbagai kegiatan. Hal ini menjadi kunci karena fokus kegiatan transisi adalah menjaga kepercayaan pemerintah Indonesia dan memanfaatkan momentum untuk mendorong perubahan. Pemahaman atas masalah dan konteks terutama di tingkat daerah, diperlukan untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi pemerintah, dan bagaimana situasi politik ekonomi mempengaruhi masalah tersebut.

Selain pemahaman atas masalah dan konteks lokal yang penting, pembelajaran lain yang didapatkan adalah bahwa pemetaan tentang sumber daya yang tersedia baik kelembagaan, SDM dan kapasitasnya, termasuk ketersediaan anggaran untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai contoh, dengan memahami isu ketersediaan data Orang Asli Papua dan perubahan kebijakan otonomi khusus, akan memungkinkan pemerintah Provinsi Papua Barat dapat secara efektif mendorong pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dana otonomi khusus untuk perluasan SAIK+.



Pendekatan kolaboratif dan simulatif dalam Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Otsus Papua (PMK No. 76 Tahun 2022) merupakan model efektif dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya di Tanah Papua (12-13/09/2022)

Tim Transisi mempelajari bahwa ternyata fasilitasi dengan pendekatan teknokratis dengan pejabat kepala daerah, cukup efektif mendorong perubahan. Seperti contoh dengan Pj Gubernur Aceh dalam mendorong dukungan perpanjangan otonomi khusus Aceh dan Pj Gubernur Papua Barat dalam mendorong perluasan SAIK+, namun diperlukan strategi keberlanjutan setelah Pemilu 2024.

Selain pendekatan kolaboratif, Tim Transisi menemukan bahwa penggunaan teknik simulasi dalam penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) dapat menjadi model penting untuk meningkatkan kapasitas bagi pemerintah daerah. Sebagai contoh dalam memberikan penguatan kapasitas implementasi PMK No. 76 Tahun 2022 untuk penyusunan RAP otonomi khusus dan pelaksanaan Training of Trainers SAIK+/SIO Papua, Tim Transisi memberikan contoh dan praktek pelaksanaan yang mudah dipahami oleh peserta bimtek. Dengan contoh dan praktek langsung ini, peserta dapat lebih cepat menyelesaikan tugas, misalnya menyiapkan dokumen RAP sesuai hasil pelatihan. Lebih jauh dari kegiatan dukungan sosialisasi dan bimtek PMK No. 76 Tahun 2022, Tim Transisi mempelajari bahwa sosialisasi yang lebih luas dan lebih rinci juga dibutuhkan terkait kebijakan baru yang memperbaiki tata kelola mekanisme transfer dana otonomi khusus di Tanah Papua dan Aceh.

Dalam hal manajemen kegiatan, pembelajaran penting yang ditemukan bahwa dalam satu kegiatan dapat melakukan 1-2 intervensi yang bersamaan. Contohnya adalah mendorong perluasan SAIK+ dan SIO Papua sebagai contoh RAP dalam sosialisasi PMK No. 76 Tahun 2022 bersama Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, Tim Transisi tetap perlu menangkap keberagaman implementasi dukungan/advokasi program di wilayah yang berbeda untuk isu-isu yang sama. Sebagai contoh dalam pengembangan sistem informasi berbasis lokal, terdapat perbedaan dukungan implementasi SAIK+ dan SIO Papua meskipun sama-sama dalam konteks Otsus dan berlokasi di Tanah Papua. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kapasitas tata kelola, SDM dan konstelasi politik di ke dua wilayah yang berbeda.

Kegiatan di masa transisi secara implisit telah menyediakan kerangka bagi pengarusutamaan GEDSI untuk program SKALA. Selama masa transisi, isu GEDSI belum banyak dielaborasi secara eksplisit dalam kegiatan. Hal ini dikarenakan pendekatan GEDSI secara eksplisit akan membutuhkan keahlian spesifik, anggaran dan waktu yang lebih lama. Selama periode transisi, pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan hubungan baik dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai contoh terkait dukungan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, tim memberikan input teknis untuk penyusunan Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Khusus mulai tingkat kampung hingga nasional. Tim juga memastikan adanya nomenklatur aspek GEDSI pada sistem informasi pembangunan daerah. Untuk kegiatan terkait LOGIS, penguatan pendataan bagi kelompok miskin dan rentan telah menyediakan data yang perlu ditindaklanjuti. Namun perlu penguatan kapasitas data literasi dan analisis kepada pemerintah daerah dan desa sehingga mampu memprioritaskan program dan anggaran pembangunan untuk mengatasi persoalan layanan dasar.

Dari sisi pengelolaan Tim Transisi, BaKTI sebagai pengelola program juga memperoleh nilai tambah berupa pengalaman dan jaringan. Bagi Tim Transisi, pengetahuan dan pengalaman BaKTI mengelola program di tanah Papua telah

memudahkan tim kerja untuk mengelola berbagai kegiatan. Selain itu BaKTI juga mempelajari bahwa penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang lebih detail sangat membantu dalam mengalokasikan dukungan administrasi yang dibutuhkan. Dengan mengelola Transisi Program SKALA, BaKTI memperoleh pengalaman serta memperluas jejaring, khususnya dengan Kementerian/Lembaga di pusat maupun di daerah, khususnya di Aceh.

6.2 Tantangan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas, memiliki peran kunci dalam mendorong prioritas dan agenda pembangunan di daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi Tim Transisi adalah perubahan dan dinamika dalam ketiga kementerian. Di Kemendagri sebagian pejabat eselon 2 mengisi jabatan sementara kepala daerah sehingga koordinasi kegiatan membutuhkan waktu. Di Bappenas, pelaksanaan registrasi sosial ekonomi menimbulkan dinamika di daerah, disebabkan adanya arahan dari kementerian lembaga lain untuk menggunakan sistem pendataan yang sudah eksisting, menyebabkan adanya keengganan mengintegrasikan sistem informasi dan data pusat (terutama Bappenas) dan daerah.

Pemekaran daerah dan kepemimpinan transisi memberi konteks dan dinamika tersendiri. Meskipun dapat secara efektif meminimalisir aspek politis, Tim Transisi menemui tantangan dalam upaya menjaga hubungan baik yang berkelanjutan dengan kepemimpinan transisi sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Demikian halnya dengan pemekaran daerah, khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, dimana sampai dengan akhir masa transisi, keberlanjutan dukungan terhadap penggunaan SAIK+ di Papua Barat dan SIO Papua belum dapat diidentifikasi.

6.3 Adaptasi

Sejak awal, perencanaan kegiatan Tim Transisi dilakukan secara adaptif berdasarkan peluang yang ada (*by design*) dan/atau berdasarkan permintaan (*by demand*). Adaptasi dilakukan sepanjang periode transisi, untuk memastikan fokus dukungan dapat mendorong hasil yang optimal untuk meningkatkan kepercayaan serta keterlibatan dan pemerintah. Adaptasi dilakukan setelah Tim Transisi melakukan berbagai analisis konteks dan dinamika. Adaptasi melalui perubahan rencana kegiatan secara terukur baik perubahan waktu, komposisi keterlibatan tim teknis dan penyesuaian anggaran dengan tidak mengurangi kualitas target hasil.



Rekomendasi untuk implementasi Program SKALA

Tim Transisi telah mengidentifikasi beberapa rekomendasi untuk diteruskan oleh Program SKALA. Rekomendasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan:

- 1 Berbagai hasil yang telah dihasilkan selama periode transisi dan terindikasi memiliki signifikansi atau berpotensi berkontribusi secara signifikan pada tujuan lebih luas Program SKALA.
- 2 Pembelajaran dari implementasi periode transisi.
- 3 Hasil konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga pada periode Oktober sampai dengan Desember 2022.

Kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilanjutkan SKALA sebagaimana dalam matriks berikut ini.

7.1 Rekomendasi untuk dukungan teknis penguatan Otonomi Khusus di tingkat pusat

7.1.1 Rekomendasi Dukungan Teknis untuk Bappenas

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan dukungan teknis dan fasilitasi dalam penyusunan dan sosialisasi Pedoman Perencanaan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus)	<input checked="" type="checkbox"/>	interim
2 Melanjutkan advokasi implementasi RAPP ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.		<input checked="" type="checkbox"/>

7.1.2 Rekomendasi Dukungan Teknis untuk Kemenkeu

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan dukungan teknis dalam penguatan kerangka regulasi dan kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Publik dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah		✓
a advokasi/fasilitasi penguatan kualitas belanja desa melalui integrasi keuangan desa dengan keuangan pusat dan daerah		✓
b advokasi/fasilitasi perbaikan data dan kualitas laporan keuangan daerah	✓	
c advokasi/fasilitasi penyusunan kebijakan tentang Dana Abadi Daerah	✓	
d fasilitasi dan advokasi finalisasi format laporan penggunaan dana Otonomi Khusus;	✓	
e fasilitasi/mendukung sosialisasi kepada Pemerintah Daerah tentang pengisian format laporan penggunaan dana Otonomi Khusus; serta	✓	
2 Melakukan advokasi/fasilitasi penyusunan rencana strategis DJPK	✓	

7.1.3 Rekomendasi Dukungan Teknis untuk Kemendagri

7.2 Rekomendasi untuk dukungan teknis penguatan Otonomi Khusus di tingkat pusat

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan dukungan teknis dalam penguatan kerangka regulasi dan kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Publik dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah		
a advokasi/fasilitasi penguatan kebijakan tata kelola dan keuangan otonomi khusus yang lebih efektif di Tanah Papua;		✓
b advokasi/fasilitasi optimalisasi pemanfaatan DAK Fisik dalam mendukung pencapaian target penyediaan layanan dasar;		✓
c advokasi/fasilitasi penerapan kebijakan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah untuk penyediaan layanan dasar yang lebih baik;		✓
d advokasi/fasilitasi penguatan kapasitas perencanaan daerah melalui SIPD dalam rangka penyusunan RKPD 2024 dan RPJMD 2025-2030;		✓
e advokasi/fasilitasi penerapan SPM dalam dokumen perencanaan di Daerah;		✓

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
f advokasi/fasilitasi penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Aceh; serta		✓
g advokasi/fasilitasi penguatan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Papua.		✓
2 Melanjutkan advokasi/fasilitasi penguatan peran distrik/kecamatan dalam mendukung layanan dasar		✓

7.2.1 Rekomendasi Dukungan Teknis di Aceh

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan dukungan pengembangan rencana pembiayaan pembangunan berkelanjutan Provinsi Aceh dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk:		
a asistensi/fasilitasi penyusunan Qanun pengelolaan keuangan Aceh (Dana Abadi, PAD, Otsus);	✓	
b asistensi/fasilitasi penataan ulang SOTK pengelolaan keuangan	✓	
c asistensi/fasilitasi mekanisme peningkatan potensi pendapatan dan pembiayaan Aceh;		✓
d melanjutkan kajian penggunaan dana Otsus dengan melibatkan kabupaten/kota dan masyarakat, dalam rangka perpanjangan UU Otsus Aceh; serta		✓
e asistensi/fasilitasi revisi UU Aceh dengan semangat pengelolaan Dana Otsus (UU-PA) yang lebih transparan, akuntabel dan terukur.		✓
2 Melanjutkan dukungan teknis penguatan perencanaan pembangunan daerah (baik jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang), khususnya dalam meningkatkan layanan dasar yang sesuai Standar Pelayanan Minimal		✓

7.2.2 Rekomendasi Dukungan Teknis di Papua

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan dukungan teknis penguatan kebijakan tata kelola dan keuangan Otsus yang lebih efektif di Papua serta penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), melalui:		

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
a pendampingan terhadap proses Musrenbang Otsus agar terjadi pada setiap siklus perencanaan, termasuk memastikan finalisasi panduan dan sosialisasi terjadi pada tahun 2023;	✓	
b advokasi dan implementasi UU Otsus Papua, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, RAPPP dan PMK No. 76 Tahun 2022 ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota,		✓
c penguatan kapasitas/pendampingan kepada Pemerintah Daerah tentang kodefikasi nomenklatur sesuai PP No. 106 Tahun 2021;	✓	
d penguatan peran distrik dalam penyediaan layanan dasar dan binwas kampung;		✓
e penguatan kapasitas penggunaan SIKD-OTSUS;	✓	
f asistensi/fasilitasi perencanaan, penganggaran dan implementasi PPSB (Prioritas Program Strategis Bersama) Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta	✓	
g asistensi/fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat daerah, termasuk PERGUB, PERDASI dan PERDASUS, khususnya dalam penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial OAP.		✓
2 Melanjutkan pendampingan dan asistensi pelaporan penggunaan dana Otsus yang berkualitas dan berorientasi dampak	✓	
3 Melanjutkan dukungan dalam penguatan strategi komunikasi Otsus serta implementasi proses sosialisasi tentang realisasi penggunaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus Papua		✓

7.2.3 Rekomendasi Dukungan Teknis di Papua Barat

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan dukungan teknis penguatan kebijakan tata kelola dan keuangan Otsus dan non-Otsus yang lebih efektif di Papua Barat serta penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), melalui:		
a pendampingan terhadap proses Musrenbang Otsus agar terjadi pada setiap siklus perencanaan, termasuk memastikan finalisasi panduan dan sosialisasi terjadi pada tahun 2023;	✓	
b advokasi dan implementasi UU Otsus Papua, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, RAPPP dan PMK No. 76 Tahun 2022 ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota,		✓

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
c penguatan kapasitas/pendampingan kepada Pemerintah Daerah tentang kodefikasi nomenklatur sesuai PP No. 106 Tahun 2021;	✓	
d penguatan peran distrik dalam penyediaan layanan dasar dan binwas kampung sebagai bagian dari implementasi PROSPPEK OTSUS;		✓
e penguatan kapasitas penggunaan SIKD-OTSUS;	✓	
f asistensi/fasilitasi perencanaan, penganggaran dan implementasi PPSB (Prioritas Program Strategis Bersama) Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta	✓	
g Asistensi/fasilitasi perumusan kebijakan, desain program dan implementasi percepatan peningkatan IPM	✓	
h asistensi/fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat daerah, termasuk Perdasi dan Perdasus, khususnya dalam penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial OAP.		✓
2 Melanjutkan pendampingan dan asistensi pelaporan penggunaan dana Otsus yang berkualitas dan berorientasi dampak	✓	
3 Melanjutkan dukungan dalam penguatan strategi komunikasi Otsus serta implementasi proses sosialisasi tentang realisasi penggunaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus Papua Barat		✓

7.2.4 Rekomendasi Dukungan Teknis di DOB

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan dukungan teknis penguatan kebijakan tata kelola dan keuangan Otsus yang lebih efektif di DOB serta penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), melalui:		
a pendampingan terhadap proses Musrenbang Otsus agar terjadi pada setiap siklus perencanaan, termasuk memastikan finalisasi panduan dan sosialisasi terjadi pada tahun 2023;		✓
b advokasi dan implementasi UU Otsus Papua, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, RAPPP dan PMK No. 76 Tahun 2022 ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota,		✓
c penguatan kapasitas/pendampingan kepada Pemerintah Daerah tentang kodefikasi nomenklatur sesuai PP No. 106 Tahun 2021;		✓

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
2 Melanjutkan pendampingan dan asistensi pelaporan penggunaan dana Otsus yang berkualitas dan berorientasi dampak		✓
3 Melanjutkan dukungan dalam penguatan strategi komunikasi Otsus serta implementasi proses sosialisasi tentang penggunaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus		✓

7.3 Rekomendasi untuk dukungan adopsi dan replikasi LOGIS

7.3.1 Rekomendasi Dukungan Teknis di Aceh (SIGAP)

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan pendampingan dan penguatan tata kelola kelembagaan dan operasional SATU Data Aceh serta implementasi roadmap SIGAP, melalui:		
a fasilitasi advokasi SIGAP masuk dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di provinsi dan kabupaten;	✓	
b fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintah gampong, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi dalam memahami dan memanfaatkan data SIGAP untuk kebijakan dan perencanaan penganggaran, termasuk pemanfaatan data <i>by name by address</i> yang menasar kelompok perempuan, disabilitas dan rentan (GEDSI);		✓
c fasilitasi penguatan pejabat kunci serta SDM pengelola SIGAP di gampong, kecamatan, kabupaten, dan provinsi;		✓
d fasilitasi penguatan operator gampong/PRG/KIG sebagai penggerak dalam pemutakhiran dan pemanfaatan data melalui kerjasama dengan BPS (Koseka) dan Kominsa; serta		✓
e fasilitasi pengembangan dan penguatan <i>system and maintenance</i> (Q/A) SIGAP.	✓	
2 Melanjutkan fasilitasi dan penguatan tata kelola integrasi data (terpilah OAP-Non OAP, Regsosek, Siskeudes, Prodeskel) dan sistem SIGAP melalui sistem SIPD-SEPAKAT		✓
3 Fasilitasi dan advokasi tingkat pusat terkait peran desa dalam pengumpulan dan pemuktahiran data lintas sektor (<i>bottom-up data processing</i>)		✓

7.3.2 Rekomendasi Dukungan Teknis di Papua (SIO Papua)

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan pendampingan dan fasilitasi penguatan tata kelola dan operasional SIO Papua, melalui:		
a fasilitasi advokasi kebijakan tingkat provinsi (termasuk strategi advokasi di DOB) untuk penguatan kelembagaan dan perluasan/replikasi		✓
b fasilitasi perluasan/replikasi ke kabupaten dan provinsi pemekaran, termasuk penguatan kapasitas SDM di semua level (kampung-provinsi)		✓
c fasilitasi penguatan distrik untuk binwas kampung dalam rangka pengumpulan, pemutakhiran dan pemanfaatan data untuk peningkatan layanan dasar khususnya menyoar kelompok perempuan, disabilitas dan rentan (GEDSI)		✓
d fasilitasi penguatan pemanfaatan data oleh setiap level pemerintahan (kampung-provinsi)		✓
e fasilitasi pemadanan data terpilah OAP dan Non OAP dengan data hasil Regsosek dan analisis data	✓	
f fasilitasi penguatan pejabat kunci serta SDM pengelola SAIK+ dan SIO Papua di kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi		✓
g fasilitasi pengembangan dan penguatan system dan maintenance (Q&A)	✓	
h fasilitasi dan penguatan kader kampung sebagai penggerak perubahan di tingkat kampung termasuk dalam pemutakhiran dan pemanfaatan data		✓
2 Melanjutkan fasilitasi dan penguatan tata kelola integrasi data (terpilah OAP-Non OAP, Regsosek, Siskeudes, Prodeskel) dan sistem SIO Papua melalui sistem SIPD-SEPAKAT		✓
3 Fasilitasi dan advokasi tingkat pusat terkait peran desa dalam pengumpulan dan pemutakhiran data lintas sektor (bottom-up data processing)		✓

7.3.3 Rekomendasi Dukungan Teknis di Papua Barat (SAIK+)

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan pendampingan dan fasilitasi penguatan tata kelola dan operasional SAIK+, melalui:		

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
a fasilitasi advokasi kebijakan tingkat provinsi untuk penguatan kelembagaan dan perluasan/replikasi		✓
b fasilitasi perluasan/replikasi ke kabupaten dan provinsi pemekaran, termasuk penguatan kapasitas SDM di semua level (kampung-provinsi)		✓
c fasilitasi penguatan distrik untuk binwas kampung dalam rangka pengumpulan, pemutakhiran dan pemanfaatan data untuk peningkatan layanan dasar khususnya menyoar kelompok perempuan, disabilitas dan rentan (GEDSI)		✓
d fasilitasi penguatan pemanfaatan data oleh setiap level pemerintahan (kampung-provinsi)		✓
e fasilitasi pemadanan data terpilah OAP dan Non OAP dengan data hasil Regsosek dan analisis data	✓	
f fasilitasi penguatan pejabat kunci serta SDM pengelola SAIK+ di kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi		✓
g fasilitasi pengembangan dan penguatan system dan maintenance (Q&A)	✓	
h fasilitasi dan penguatan kader kampung sebagai penggerak perubahan di tingkat kampung termasuk dalam pemuktahiran dan pemanfaatan data		✓
2 Melanjutkan fasilitasi dan penguatan tata kelola integrasi data (terpilah OAP-Non OAP, Regsosek, Siskeudes, Prodeskel) dan sistem SAIK+ melalui sistem SIPD-SEPAKAT		✓
3 Fasilitasi dan advokasi tingkat pusat terkait peran desa dalam pengumpulan dan pemuktahiran data lintas sektor (bottom-up data processing)		✓

7.3.4 Rekomendasi Dukungan Teknis di DOB

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Melanjutkan pendampingan dan fasilitasi penguatan tata kelola dan operasional SAIK+ / SIO Papua, melalui:		
a fasilitasi advokasi kebijakan tingkat provinsi untuk penguatan kelembagaan dan replikasi		✓
b fasilitasi perluasan/replikasi ke kabupaten dan provinsi pemekaran, termasuk penguatan kapasitas SDM di semua level (kampung-provinsi)		✓

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
c fasilitasi penguatan distrik untuk binwas kampung dalam rangka pengumpulan, pemutakhiran dan pemanfaatan data untuk peningkatan layanan dasar khususnya menasar kelompok perempuan, disabilitas dan rentan (GEDSI)		✓
d fasilitasi penguatan pemanfaatan data oleh setiap level pemerintahan (kampung-provinsi)		✓
e fasilitasi pemadanan data terpilah OAP dan Non OAP dengan data hasil Regsosek dan analisis data		
f fasilitasi penguatan pejabat kunci serta SDM pengelola SAIK+ di kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi		✓
g fasilitasi pengembangan dan penguatan system dan maintenance (Q&A)		✓
h fasilitasi dan penguatan kader kampung sebagai penggerak perubahan di tingkat kampung termasuk dalam pemuktahiran dan pemanfaatan data		✓
2 Melanjutkan fasilitasi dan penguatan tata kelola integrasi data (terpilah OAP-Non OAP, Regsosek, Siskeudes, Prodeskel) dan sistem SAIK+ melalui sistem SIPD-SEPAKAT		✓
3 Fasilitasi dan advokasi tingkat pusat terkait peran desa dalam pengumpulan dan pemuktahiran data lintas sektor (<i>bottom-up data processing</i>)		✓

7.4 Rekomendasi untuk Knowledge Management/ Policy Brief dan GEDSI

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
1 Menyusun risalah kebijakan (<i>policy brief</i>) tentang sistem informasi desa (SID) di daerah otonomi khusus sebagai rekomendasi kebijakan untuk Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah		✓
2 Mendokumentasikan berbagai kegiatan dan intervensi terkait Sistem Informasi Desa (SID) di daerah otonomi khusus yang telah dilakukan ke dalam beberapa produk pengetahuan (<i>knowledge products</i>) seperti cerita perubahan (SoC), <i>working paper</i> , dll.		✓
3 Pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan pemanfaatan analisis dan bukti mengenai GEDSI dalam menyiapkan kebijakan, perencanaan, dan anggaran guna memastikan pemenuhan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan, melalui:		

Rekomendasi	Jangka Menengah (2023-2026)	Jangka Menengah (2023-2030)
<p>a melakukan GEDSI analisis sebagai dasar pengembangan strategi pada tingkat nasional yang mencakup lintas pilar.</p>		<p>✓</p>
<p>b identifikasi intervensi GEDSI sesuai dengan diskusi dengan Kementrial Lembaga dan Pemerintah Daerah</p>		<p>✓</p>



8 Laporan Keuangan

BaKTI menerima total anggaran sebesar AUD 959,872.88 yang terbagi dalam dua kali transfer. Transfer pertama diterima pada tanggal 19 Mei 2022 senilai AUD 449,869 dengan nilai tukar Rupiah sebesar 1 AUD = Rp 10.104,58, sehingga nilai Rupiah yang diterima sebesar Rp 4.568.006.943,08. Untuk transfer kedua diterima pada tanggal 17 Oktober 2022 senilai AUD 510,003.88 dengan nilai tukar Rupiah sebesar 1 AUD = Rp 9.585,75. Sehingga nilai Rupiah yang diterima sebesar Rp 4.888.769.470, 86. Dengan demikian, total dana yang diterima BaKTI senilai Rp 9.456.776.413, 94

Sampai berakhirnya masa hibah pada tanggal 31 Desember 2022, Tim Transisi telah menggunakan dana sebesar Rp 9.586.362.433 atau 98.9 % dari dana hibah yang dianggarkan.

Masih ada sisa anggaran sebesar Rp 108.353.655 yang akan dikembalikan ke DFAT.

Secara umum, anggaran fase transisi dibagi sebagaimana berikut.

Komponen	Anggaran	Persentase dari Total Anggaran	Pengeluaran per 31 Desember 2022		Sisa Anggaran
			IDR	%	
Personnel Cost	5,244,035,744	54.1%	5,070,510,744	96.7%	173,525,000
Operational Cost	228,750,000	2.4%	246,460,480	107.7%	(17,710,480)
Activity Cost	3,144,744,404	32.4%	2,979,442,787	94.7%	165,301,617
Management Fee	1,077,185,940	11.1%	1,077,185,940	100.0%	-
Bank Interest & Charge			(25,177,192)		25,177,192
Gain & Loss on Exchange Rate			237,939,674		(237,939,674)
TOTAL	9,694,716,088	100%	9,586,365,433	98.9%	108,353,655



9

Rencana Serah Terima

9.1 Aset dan kantor

Berakhirnya periode dukungan Tim Transisi pada tanggal 31 Desember 2022 berimplikasi pada berakhirnya tanggungjawab BaKTI dalam mengelola aset dan kantor Tim Transisi di Jayapura (Provinsi Papua) dan Banda Aceh (Provinsi Aceh).

Mempertimbangkan belum tersusunnya strategi jangka panjang dan rencana kerja tahun jamak (multi-year work plan) untuk penentuan lokasi provinsi, maka berdasarkan dokumen rancangan investasi dan kontrak SKALA, diharapkan SKALA akan tetap beroperasi di Provinsi Papua dan Aceh. Oleh karena itu, penting bagi SKALA untuk mempertahankan kantor di Jayapura dan Banda Aceh. SKALA telah mengambil alih tanggungjawab dari BaKTI untuk melaksanakan kegiatan di ke dua kantor tersebut dengan melibatkan personel kunci.

9.1.1 Aset dan Kantor di Jayapura

- 1 Kantor yang digunakan Tim Transisi terletak di Komplek Perkantoran Adripura, Jl. Raya Ardiapura, Jayapura, Papua.
- 2 Kantor ini sebelumnya disewa oleh KOMPAK setelah melalui proses pengadaan, serta digunakan oleh personil KOMPAK bersama dengan Tim KOMPAK-Landasan. Personel Tim KOMPAK-Landasan direkrut oleh BaKTI berdasarkan subkontrak dengan KOMPAK.
- 3 Pada akhir periode dukungan KOMPAK, BaKTI mengambil alih kantor Jayapura dengan menggunakan hibah dari DFAT. Biaya sewa kantor Jayapura sebesar Rp. 123.750.000 untuk penggunaan selama 6 bulan.
- 4 Seluruh barang inventaris KOMPAK di kantor Jayapura juga diserahkan kepada BaKTI untuk digunakan dalam implementasi program hibah DFAT.
- 5 Tim Transisi merekomendasikan penyewaan ruang kantor yang sama di Jayapura mulai 1 Januari 2023, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
 - a. SKALA perlu melanjutkan penggunaan kantor Jayapura untuk pelaksanaan kegiatan serta ruang kerja bagi personel SKALA di Jayapura.
 - b. Kantor Jayapura saat ini berada di lokasi yang baik dan aman. Hal ini menjadi salah satu alasan utama KOMPAK/BaKTI terus menggunakan

kantor tersebut sejak tahun 2019. Selain itu, SKALA tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari alternatif kantor lain.

- c. Berlanjutnya penyewaan kantor Jayapura ini akan menghemat biaya tambahan untuk pengaturan ruang kantor baru dan biaya relokasi.
 - d. Penyewaan kantor akan dilakukan untuk jangka waktu 6 bulan dan selanjutnya akan dilakukan negosiasi dengan pemilik. Dalam negosiasi lanjutan, SKALA akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan kantor di Jayapura (finalisasi kebutuhan staf, strategi pelaksanaan kegiatan, dll), sehingga dapat membuat keputusan tentang keberlanjutan penyewaan kantor Jayapura dalam jangka panjang.
- 6 BaKTI saat ini telah mempekerjakan 2 (dua) petugas keamanan (satpam) merangkap asisten kantor. SKALA berencana untuk melibatkan satpam profesional untuk jangka panjang. Meski demikian, untuk periode interim 6 bulan ini, SKALA akan melanjutkan pengelolaan yang sama sebagaimana yang diterapkan BaKTI.
 - 7 BaKTI saat ini telah menggunakan jasa penyedia layanan internet di Kantor Jayapura. SKALA perlu meninjau seluruh kebutuhan koneksi internet dan memutuskan apakah akan melanjutkan penggunaan jasa penyedia layanan internet saat ini atau mencari opsi lain.
 - 8 Jika poin-poin yang diusulkan di atas disetujui, SKALA akan merekomendasikan kepada DFAT untuk meminta BaKTI menyerahkan barang-barang inventaris kepada SKALA, baik inventaris yang sebelumnya diserahkan dari KOMPAK maupun inventaris yang dibeli oleh BaKTI berdasarkan subkontrak dengan KOMPAK / hibah DFAT).

9.1.2 Aset dan Kantor di Banda Aceh

- 1 Ruang kantor yang digunakan KOMPAK di Banda Aceh dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, terletak di Jalan Gurami Nomor 18 Lantai 2, Lamprit, Kota Banda Aceh.
- 2 Berdasarkan diskusi antara DFAT dan Pemerintah Provinsi Aceh (sebelum periode KOMPAK berakhir), ruang kantor ini disiapkan untuk kemudian digunakan oleh SKALA. Selama periode transisi pengelolaan tempat dan barang inventaris di kantor Banda Aceh diserahkan kepada BaKTI.
- 3 SKALA merekomendasikan untuk menggunakan kantor yang sama sejak 1 Januari 2023 dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. SKALA perlu melanjutkan penggunaan ruang kantor di Banda Aceh untuk pelaksanaan kegiatan serta ruang kerja bagi personel di Banda Aceh.
 - b. Kantor Banda Aceh saat ini disediakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh tanpa biaya, serta berada di lokasi yang baik dan aman. Adapun pengaturan ruangan kantor telah dilakukan semasa program KOMPAK.
 - c. Berlanjutnya penggunaan kantor ini akan menghemat biaya tambahan untuk pengaturan ruang kantor baru dan biaya relokasi.

d. Setelah SKALA memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhannya kantor di Aceh (finalisasi kebutuhan staf, strategi pelaksanaan, dll), SKALA akan meninjau kesesuaian kantor ini untuk kebutuhan jangka panjang dan membuat keputusan lebih lanjut.

- 4. Apabila poin-poin diusulkan di atas disetujui, SKALA akan merekomendasikan kepada DFAT untuk meminta BaKTI menyerahkan kantor dan barang inventaris di dalamnya kepada SKALA.

9.2 Kemitraan dan Keterlibatan

Investasi DFAT melalui program KOMPAK telah menghasilkan jejaring dan kemitraan yang kuat dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Papua dan Pemerintah Papua Barat. Selama periode Juli - Desember 2022, Tim Transisi telah memperkuat jejaring dan kemitraan tersebut, khususnya terkait pelaksanaan otonomi khusus dan adopsi serta replikasi LOGIS, yaitu:

Kementerian/Pemda	Kemitraan dan Keterlibatan
1 Kementerian Dalam Negeri	
<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Jenderal <ul style="list-style-type: none"> ■ Pusat Fasilitasi Kerjasama ■ Pusat Data dan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. penguatan tata kelola dan koordinasi komponen internal di Kemendagri dan daerah; b. penguatan tata kelola dan pemanfaatan data kemiskinan (SEPAKAT D/K) untuk penyediaan layanan dan perlindungan sosial; c. penguatan sistem dan modul SEPAKAT serta integrasinya dengan SIPD; d. penguatan kapasitas Pemerintah Aceh dalam pengoperasian SATU Data Indonesia; dan e. penguatan tata kelola sistem informasi di daerah.
<ul style="list-style-type: none"> b. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan <ul style="list-style-type: none"> ■ Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> a. penguatan peran distrik/kecamatan dalam mendukung layanan dasar
<ul style="list-style-type: none"> c. Ditjen Bina Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> ■ Sekretariat Direktorat Jenderal ■ Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. optimalisasi pemanfaatan DAK Fisik dalam mendukung pencapaian target penyediaan layanan dasar; b. penerapan kebijakan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah untuk penyediaan layanan dasar yang lebih baik; c. penguatan kapasitas perencanaan melalui SIPD dalam rangka penyusunan RKPD 2024 dan RPJMD 2025-2030; dan d. penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Papua.

Kementerian/Pemda	Kemitraan dan Keterlibatan
1 Kementerian Dalam Negeri	
<p>d Ditjen Bina Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah ■ Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga 	<p>a. penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Papua.</p>
<p>e Ditjen Otonomi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ■ Direktorat Produk Hukum Daerah 	<p>a. penguatan kebijakan tata kelola dan keuangan otonomi khusus yang lebih efektif di Tanah Papua;</p> <p>b. penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Aceh; dan</p> <p>c. penguatan tata kelola keuangan Otonomi Khusus untuk memastikan pemenuhan ketersediaan dan pemerataan tenaga guru di Tanah Papua.</p>
2 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	
<p>a Deputi Kependudukan dan Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Masyarakat 	<p>a. penyiapan tata kelola dan pemanfaatan data kemiskinan (SEPAKAT D/K) untuk penyediaan layanan dan perlindungan sosial;</p> <p>b. penguatan sistem dan modul SEPAKAT serta integrasinya dengan SIPD maupun sistem informasi di daerah;</p> <p>c. pemanfaatan data Regsosek untuk perbaikan penyediaan layanan dasar;</p> <p>d. penyiapan desain peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti; dan</p> <p>e. fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi di daerah.</p>
<p>b Deputi Pengembangan Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Direktorat Regional III 	<p>a. penyusunan Pedoman Perencanaan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus); serta</p> <p>b. advokasi implementasi RAPPP ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>
3 Kementerian Keuangan	
<p>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sekretariat ■ Direktorat Dana Transfer Umum ■ Direktorat Dana Transfer Khusus ■ Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer ■ Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi 	<p>a. penguatan kualitas belanja desa melalui integrasi keuangan desa dengan keuangan pusat dan daerah;</p> <p>b. perbaikan data dan kualitas laporan keuangan daerah</p>

Kementerian/Pemda**Kemitraan dan Keterlibatan****4 Provinsi Aceh**

- Pj Gubernur Aceh
 - Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA)
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh
 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Aceh
 - Badan Pusat Statistik
- a. penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Aceh;
 - b. penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SIGAP, termasuk penyusunan Roadmap SATU Data.
 - d. fasilitasi untuk memastikan kerjasama Regsosek dan SIGAP, termasuk rencana replikasi.
 - e. penguatan perencanaan pembangunan daerah (baik jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang), khususnya dalam meningkatkan layanan dasar yang sesuai Standar Pelayanan Minimal

5 Provinsi Papua

- Bappeda Provinsi Papua
 - Bupati / Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
 - Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
- a. advokasi implementasi UU Otsus Papua, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, RAPPP dan PMK No. 76 Tahun 2022 ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
 - b. fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SIO Papua.
 - c. fasilitasi untuk memastikan kerjasama Regsosek dan SIO Papua, termasuk rencana replikasi.

6 Provinsi Papua Barat

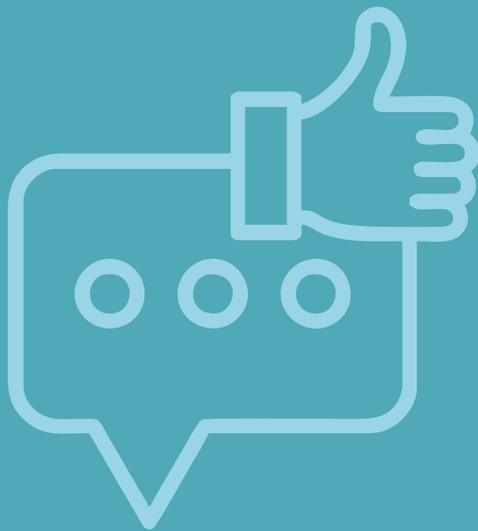
- Bappeda Provinsi Papua Barat
 - Bupati / Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
 - Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
 - Dinas Dukcapil
 - Dinas PMK
 - Dinas Kominfo
 - BPS Provinsi
- a. advokasi implementasi UU Otsus Papua, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, RAPPP dan PMK No. 76 Tahun 2022 ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
 - b. fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SAIK+.
 - c. fasilitasi untuk memastikan kerjasama Regsosek dan SAIK+ termasuk rencana replikasi.
 - d. fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan peningkatan IPM



10

Declaration

Tim Transisi menyatakan bahwa **seluruh detail yang dinyatakan dalam laporan akhir ini adalah benar dan mewakili pencapaian akhir dari Tim Transisi.**



ANNEX

Konsolidasi Rincian Hasil Kunci, Signifikansi, Rekomendasi dan Pembelajaran

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikansi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 1 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT NASIONAL

<p>1A.1 <i>Support for advocacy of report on Aceh Special Autonomy (OTSUS) Fund management 2007-2021</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan input teknis finalisasi laporan kajian Peranan Dana Otsus terhadap Pembangunan Aceh. 2. Memfasilitasi untuk mengkonsultasikan hasil sementara dan mengumpulkan input perbaikan terhadap kajian kajian pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh kepada pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas dan Kemenkopulhukam) 	<p>Perbaiki tata kelola Otsus baru meliputi perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan yang terukur, akuntabel dan transparan.</p>	<p>Hasil kajian digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai masukan revisi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pengembangan rencana pembiayaan pembangunan berkelanjutan Provinsi Aceh dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. asistensi/fasilitasi penyusunan Qanun pengelolaan keuangan Aceh (Dana Abadi, PAD, Otsus) b. asistensi/fasilitasi penataan ulang SOTK pengelolaan keuangan Aceh c. asistensi/fasilitasi mekanisme peningkatan potensi pendapatan dan pembiayaan Aceh d. asistensi/fasilitasi Revisi UU Aceh dengan semangat pengelolaan Dana Otsus (UU-PA) yang lebih transparan, akuntabel dan terukur. e. melanjutkan kajian penggunaan dana Otsus dengan melibatkan kabupaten/kota dan masyarakat, dalam rangka perpanjangan UU Otsus Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan untuk <i>memahami dinamika politik dalam isu sustainable financing Aceh</i> menjadi penting, terutama untuk menemukan stakeholder yang tepat, bagaimana membahasakan dukungan serta bagaimana cara mencapai tujuan. 2. <i>Learning by doing</i> dapat dilakukan tentang perkembangan teori development, namun dalam menghadapi dinamika regulasi diperlukan peningkatan kapasitas tim secara khusus. Cross capacity strengthening perlu diprioritaskan dalam implementasi SKALA 	<p>EOP0 1 IO 1</p>
<p>1A.2 <i>Support to develop monitoring tools on Aceh OTSUS Fund utilisation</i></p>	<p>Memberikan input teknis penyusunan instrumen pelaporan Dana Otsus sesuai dengan PMK 76/2022 dengan Aceh menjadi lokasi pilotnya</p>	<p>Instrumen yang dihasilkan diberi judul Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input Tim Transisi terhadap format laporan penggunaan dana Otsus digunakan oleh DJPK sesuai dengan PMK No. 76 Tahun 2022. 2. Laporan yang dihasilkan akan disosialisasikan bersamaan dengan Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota pada tanggal 1-2 Desember 2022. 3. Laporan ini akan digunakan sebagai syarat salur Dana Otsus Tahap 1 TA 2023. 	<p>Melanjutkan pendampingan dan asistensi pelaporan penggunaan dana Otsus yang berkualitas dan berorientasi dampak, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi dan advokasi di tingkat Pusat (DJPK) dalam finalisasi format laporan penggunaan dana Otonomi Khusus; b. fasilitasi/mendukung DJPK dalam melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah tentang pengisian format laporan; c. pendampingan/penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan penggunaan dana Otsus. 	<p>Pemahaman terhadap konteks dan isu spesifik lokal dapat secara efektif mendorong optimalisasi penggunaan dana Otsus, khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat rentan.</p>	<p>EOP0 1 IO 1 & 2</p>

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
KEGIATAN 1 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT NASIONAL						
1A.3 <i>Support for capacity building on Planning, Budgeting, Monitoring and Reporting of Special Autonomy Fund based on MoF Regulation No 76/2022 for Aceh</i>	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan input teknis dan mendukung sosialisasi kebijakan tata kelola baru Otsus Aceh sesuai dengan PMK 76/2022 Memfasilitasi dan memberikan input teknis dalam penguatan kapasitas kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pelaporan tahunan Dana Otsus TA 2022 pada tanggal 1-2 Desember 2022 di Banda Aceh. 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya template Laporan tahunan Dana Otsus TA 2022 yang akan disosialisasikan Terlaksananya Bimtek pada tanggal 1-2 Desember 2022 di Banda Aceh. Salah satu hasil penting dari laporan tersebut adalah bertambah baiknya pelaporan output, kendala dan pembelajaran pengelolaan otsus. Input dari proses penguatan kapasitas ini akan menjadi bahan masukan bagi revisi PMK Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus. 	<p>Hasil-hasil kajian dan input terhadap pengembangan kapasitas yang sudah dilakukan menjadi landasan untuk tahapan pembahasan revisi UU 11 tahun 2006</p>	<p>Melanjutkan pendampingan dan asistensi pelaporan penggunaan dana Otsus yang berkualitas dan berorientasi dampak, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitasi dan advokasi di tingkat Pusat (DJPK) dalam finalisasi format laporan penggunaan dana Otonomi Khusus; fasilitasi/mendukung DJPK dalam melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah tentang pengisian format laporan; pendampingan/penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan penggunaan dana Otsus. 	<p>Dalam pendampingan melalui BIMTEK perlu disampaikan contoh/ simulasi tentang praktik-praktik baik yang pernah dilakukan program DFAT sebelumnya, contoh: praktik penganggaran SAIK+/SIO Papua disampaikan dalam BIMTEK PMK No. 76 Tahun 2022.</p>	EOPO 1 IO 1 & 2
1A.4 <i>Support for Aceh Government Law Revision</i>	<p>Implementasi ditunda: Akan menjadi bagian dari Multi Year work plan SKALA</p>			<ol style="list-style-type: none"> Melanjutkan kajian penggunaan dana Otsus dengan melibatkan kabupaten kota dan masyarakat, dalam rangka perpanjangan UU Otsus Aceh. Melanjutkan dukungan dalam penguatan strategi komunikasi Otsus serta implementasi proses sosialisasi tentang realisasi penggunaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus. 	<p>Kemampuan untuk memahami dinamika politik dalam isu <i>sustainable financing</i> Aceh menjadi penting, terutama untuk menemukan stakeholder yang tepat, bagaimana membahasakan dukungan serta bagaimana cara mencapai tujuan.</p>	EOPO 1 IO 1
1B.1 <i>Support for development of OTSUS planning meeting (MUSRENBANG OTSUS) guideline for Papua province</i>	<p>Memberikan input teknis dalam pengembangan Panduan Musrenbang Otsus Tanah Papua</p>	<p>Draft 3 dari Panduan Musrenbang Otsus Tanah Papua telah difinalisasi dan didiskusikan bersama Bappenas</p>	<ol style="list-style-type: none"> Input teknis Tim Transisi telah diterima dan digunakan oleh Bappenas Dukungan ini penting untuk memastikan proses perencanaan pembangunan yang efektif dan memastikan partisipasi OAP di setiap tingkatan. Panduan ini merupakan mandat dari PMK 76/2022 dan tidak pernah ada sebelumnya. 	<p>Melanjutkan pendampingan terhadap proses Musrenbang Otsus agar terjadi pada setiap siklus perencanaan, termasuk memastikan finalisasi panduan dan sosialisasi terjadi pada tahun 2023.</p>	<p><i>Learning by doing</i> dapat dilakukan tentang perkembangan teori development, namun dalam menghadapi dinamika regulasi diperlukan peningkatan kapasitas tim secara khusus. <i>Cross capacity strengthening</i> perlu diprioritaskan dalam implementasi SKALA.</p>	EOPO 1 IO 1, 2 & 3

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 1 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT NASIONAL

<p>1B.2 <i>Support for Special Autonomy Fund allocation calculation</i></p>	<p>Pekerjaan ini sudah diselesaikan oleh DJPK melalui APB</p>				<p>Ada kebutuhan mendesak penyusunan PMK alokasi dana Otsus untuk Provinsi DOB yang disahkan setelah pengesahan UU APBN bulan Oktober 2022 (Papua Barat Daya dan Papua Utara).</p>	<p>EOPO 1 IO 1</p>
<p>1B.3 <i>Support to update nomenclature of OTSUS program for Papua province</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi dan memberikan input teknis terhadap finalisasi kodefikasi dan nomenklatur Otsus Papua sesuai dengan PP 106/2012 Memfasilitasi diskusi antar Direktorat di Ditjen Bina Bangsa Kemendagri dengan Pemprov Papua dan K/L terkait dengan finalisasi kodefikasi dan nomenklatur Otsus Papua 	<p>Kemendagri telah merevisi nomenklatur pendidikan dan CRVS berdasarkan input dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang difasilitasi oleh Tim Transisi serta input teknis dari Tim Transisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Input Tim Transisi tentang nomenklatur dan kodefikasi sesuai PP No.106 Tahun 2021 di Provinsi Papua dan Papua Barat diterima dan dicantumkan dalam SE Kemendagri No. 900/6325/SJ, khususnya tentang: <ol style="list-style-type: none"> Beasiswa guru Berpindahnya kewenangan pengelolaan SMA ke Kabupaten Sekolah Berasrama SIO Papua Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri, diketahui bahwa kegiatan ini merupakan prioritas Kemendagri untuk mendukung implementasi Otsus di Papua dan Papua Barat sesuai UU No.2 Tahun 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> Melanjutkan penguatan kapasitas/ pendampingan kepada Pemerintah Daerah tentang kodefikasi nomenklatur sesuai PP No. 106 Tahun 2021. Melanjutkan penguatan kapasitas/ pendampingan kepada Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai nomenklatur, termasuk penguatan kapasitas penggunaan SIKD-OTSUS, serta PPSB (Prioritas Program Strategis Bersama) Provinsi dan Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu kehati-hatian dalam memahami konteks lokal baik dalam implementasi maupun politik Kemampuan untuk memahami situasi/dinamika politik di lokasi/tempat berkegiatan, untuk menemukan siapa orang yang tepat, bagaimana membahasakan dukungan serta cara mencapai tujuan 	<p>EOPO 1 1 & 2</p>
<p>1B.4 <i>Support for formulation of local regulations mandated by Papua Special Autonomy Law</i></p>	<p>Implementasi ditunda: Akan menjadi bagian dari Multiyear workplan SKALA</p>				<ol style="list-style-type: none"> Perlu kehati-hatian dalam memahami konteks lokal baik dalam implementasi maupun politik Kemampuan untuk memahami situasi/dinamika politik di lokasi/tempat berkegiatan, untuk menemukan siapa orang yang tepat, bagaimana membahasakan dukungan serta cara mencapai tujuan 	<p>EOPO 1 IO 1</p>

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikansi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 1 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT NASIONAL

1B.5

Support for capacity building on Planning, Budgeting, Monitoring and Reporting of Special Autonomy Fund based on MoF Regulation No 76/2022 and Government Regulation No 106/2021 for the Papua province

1. Memberikan input teknis penyusunan instrumen perencanaan (RAP) sesuai dengan PMK 76/2022 dengan Papua dan Papua Barat menjadi pilotingnya. Instrumen tersebut telah berhasil dibuat online dalam aplikasi SIKD OTSUS.
2. Memfasilitasi dan memberikan input teknis contoh RAP yang lengkap berdasarkan pembelajaran penyusunan perencanaan dan penganggaran SIO Papua dan Kebutuhan Guru

1. Perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten di Provinsi Papua paham mengenai intisari PMK 76/2022 untuk meningkatkan tata kelola dana Otsus dan implementasinya
2. Perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten di Provinsi Papua mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi SIKD Otsus untuk revisi Rencana Anggaran Program (RAP)
3. Kemenkeu, forum sosialisasi, dan Tim Transisi mengidentifikasi kebutuhan untuk pelatihan teknis lebih lanjut, termasuk kebutuhan penyusunan panduan teknis

1. Terjadi peningkatan kapasitas perwakilan Pemkab/Pemkot di Papua dalam pengelolaan dana Otsus.
2. Beberapa Pemkab/Pemkot mengalokasikan APBD untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang lebih luas.

1. Advokasi implementasi UU Otsus Papua, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, RAPP dan PMK No. 76 Tahun 2022 ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk DOB.
2. Penguatan kapasitas/pendampingan kepada Pemerintah Daerah tentang kodefikasi nomenklatur sesuai PP No. 106 Tahun 2021.

Terdapat banyak kegiatan dalam workplan, namun sebetulnya cukup banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan seperti penyusunan dokumen Musrenbangs dan BIMTEK PMK 76 untuk Papua dan Papua Barat

**EPO 1
IO 1, 2 & 3**

1C.1

Support for development of OTSUS planning meeting (MUSRENBANG OTSUS) guideline for Papua Barat province

Memberikan input teknis dalam pengembangan Panduan Musrenbang Otsus Tanah Papua

Draft 3 dari Panduan Musrenbang Otsus Tanah Papua telah difinalisasi dan didiskusikan bersama Bappenas. Dukungan ini penting untuk memastikan proses perencanaan pembangunan yang efektif dan memastikan partisipasi OAP di setiap tingkatan. Panduan ini merupakan mandat dari PMK 76/2022 dan tidak pernah ada sebelumnya.

Input teknis Tim Transisi telah diterima dan digunakan oleh Bappenas

Melanjutkan pendampingan terhadap proses Musrenbang Otsus agar terjadi pada setiap siklus perencanaan, termasuk memastikan finalisasi panduan dan sosialisasi terjadi pada tahun 2023.

Pelibatan mitra/SDM lokal (Pemda, universitas, lembaga non pemerintah, kelompok adat, kelompok agama) menjadi penting dalam perencanaan pembangunan

**EPO 1
1, 2, & 3**

1C.2

Support for Special Autonomy Fund allocation calculation

Pekerjaan ini sudah diselesaikan oleh DJPK melalui APBN

Ada kebutuhan mendesak penyusunan PMK alokasi dana otsus untuk Provinsi DOB yang disahkan setelah pengesahan UU APBN bulan Oktober 2022 (Papua Barat Daya dan Papua Utara).

**EPO 1
IO 1**

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 1 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT NASIONAL

<p>1C.3 Support to update nomenclature of OTSUS program for Papua Barat province</p>	<p>1. Memfasilitasi dan memberikan input teknis terhadap finalisasi kodefikasi dan nomenklatur Otsus Papua sesuai dengan PP 106/2012</p> <p>2. Memfasilitasi diskusi antar Direktorat di Ditjen Bina Bangda Kemendagri dengan Pemprov Papua dan K/L terkait dengan finalisasi kodefikasi dan nomenklatur Otsus Papua</p>	<p>Kemendagri telah merevisi nomenklatur pendidikan dan CRVS berdasarkan input dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang difasilitasi oleh Tim Transisi serta input teknis dari Tim Transisi</p>	<p>1. Input Tim Transisi tentang nomenklatur dan kodefikasi sesuai PP No.106 Tahun 2021 di Provinsi Papua dan Papua Barat diterima dan dicantumkan dalam SE Kemendagri No. 900/6325/SJ, khususnya tentang:</p> <p>a. Beasiswa guru</p> <p>b. Berpindahnya kewenangan pengelolaan SMA ke Kabupaten</p> <p>c. Sekolah Berasrama</p> <p>d. SAIK+</p> <p>e. PROSPPEK</p> <p>2. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri, diketahui bahwa kegiatan ini merupakan prioritas Kemendagri untuk mendukung implementasi Otsus di Papua dan Papua Barat sesuai UU No.2 Tahun 2021.</p>	<p>1. Melanjutkan penguatan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi tentang kodefikasi nomenklatur sesuai PP No. 106 Tahun 2021.</p> <p>2. Melanjutkan penguatan kapasitas/ pendampingan kepada Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai nomenklatur, termasuk penguatan kapasitas penggunaan SIKD-OTSUS, serta PPSB (Prioritas Program Strategis Bersama) Provinsi dan Kabupaten/Kota (mencakup PROSPPEK, SAIK+, dsb).</p>	<p>1. Perlu kehati-hatian dalam memahami konteks lokal baik dalam implementasi maupun politik</p> <p>2. Kemampuan untuk memahami situasi/dinamika politik di lokasi/tempat berkegiatan, untuk menemukan siapa orang yang tepat, bagaimana membahasakan dukungan serta cara mencapai tujuan</p>	<p>EPO1 IO 1, 2 & 3</p>
<p>1C.4 Support for formulation of local regulations mandated by Papua Special Autonomy Law</p>	<p>Implementasi ditunda: Akan menjadi bagian dari Multiyear workplan SKALA</p>				<p>1. Perlu kehati-hatian dalam memahami konteks lokal baik dalam implementasi maupun politik</p> <p>2. Kemampuan untuk memahami situasi/dinamika politik di lokasi/tempat berkegiatan, untuk menemukan siapa orang yang tepat, bagaimana membahasakan dukungan serta cara mencapai tujuan</p>	<p>EPO1 IO 1</p>

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 1 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT NASIONAL

1C.5

Support for capacity building on Planning, Budgeting, Monitoring and Reporting of Special Autonomy Fund based on MoF Regulation No 76/2022 and Government Regulation No 106/2021 for Papua Barat province

1. Memberikan input teknis penyusunan instrumen perencanaan (RAP) sesuai dengan PMK 76/2022 dengan Papua dan Papua Barat menjadi pilotingnya. Instrumen tersebut telah berhasil dibuat online dalam aplikasi SIKD OTSUS.
2. Memfasilitasi dan memberikan input teknis pembuatan contoh RAP yang lengkap berdasarkan pembelajaran penyusunan perencanaan dan penganggaran SAIK+ dan Kebutuhan Guru

1. Perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten di Provinsi Papua paham mengenai intisari PMK 76/2022 untuk meningkatkan tata kelola dana Otsus dan implementasinya
2. Perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten di Provinsi Papua mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi SIKD Otsus untuk revisi Rencana Anggaran Program (RAP)
3. Kemenkeu, forum sosialisasi, dan Tim Transisi mengidentifikasi kebutuhan untuk pelatihan teknis lebih lanjut, termasuk kebutuhan penyusunan panduan teknis

1. Terjadi peningkatan kapasitas perwakilan Pemkab/Pemkot di Papua dalam pengelolaan dana Otsus.
2. Beberapa Pemkab/Pemkot mengalokasikan APBD untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang lebih luas.

1. Advokasi implementasi UU Otsus Papua, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, RAPPP dan PMK No. 76 Tahun 2022 ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk DOB.
2. Penguatan kapasitas/pendampingan kepada Pemerintah Daerah tentang kodefikasi nomenklatur sesuai PP No. 106 Tahun 2021.

Terdapat banyak kegiatan dalam workplan, namun sebetulnya cukup banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan seperti penyusunan dokumen Musrenbangsus dan BIMTEK PMK 76 untuk Papua dan Papua Barat

**EPO1
IO 1 & 2**

KEGIATAN 2 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT DAERAH

2A.1

Dukungan Teknis Penguatan Kebijakan Otonomi Khusus di Tingkat Daerah

1. Memberikan input teknis finalisasi laporan kajian pemanfaatan dana OTSUS Aceh.
2. Memfasilitasi sosialisasi hasil kajian pemanfaatan dana OTSUS Aceh

1. Laporan hasil kajian pemanfaatan dana OTSUS Aceh
2. Rekomendasi teknis perbaikan tata kelola dana OTUS Aceh
3. Berdasarkan hasil evaluasi Dana Otsus Aceh, PJ Gubernur Aceh mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengamandemen alokasi Dana Otsus Aceh dari 2% ke 2,25%

1. Input Pemerintah Aceh terhadap kajian pemanfaatan Dana Otsus diterima oleh K/L sebagai masukan.
2. Gubernur Aceh menindaklanjuti hasil kajian dengan mengirim surat kepada Presiden.

Mendukung pengembangan rencana pembiayaan pembangunan berkelanjutan Provinsi Aceh dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk:

- a. asistensi/fasilitasi penyusunan Qanun pengelolaan keuangan Aceh (Dana Abadi, PAD, Otsus)
- b. asistensi/fasilitasi penataan ulang SOTK pengelolaan keuangan Aceh
- c. asistensi/fasilitasi mekanisme peningkatan potensi pendapatan dan pembiayaan Aceh
- d. asistensi/fasilitasi Revisi UU Aceh dengan semangat pengelolaan Dana Otsus (UU-PA) yang lebih transparan, akuntabel dan terukur.
- e. melanjutkan kajian penggunaan dana Otsus dengan melibatkan kabupaten/kota dan masyarakat, dalam rangka perpanjangan UU Otsus Aceh

Rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemanfaatan dana otonomi khusus perlu menjadi pertimbangan pemerintah Aceh untuk digunakan, agar dana otonomi khusus kedepan benar-benar dapat menjadi investasi pemerintah Aceh untuk kemandirian fiskalnya

**EPO2
IO 4 & 6**

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 2 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT DAERAH

<p>2A.2 <i>Support to identify potential sources and how to mobilize Aceh regional revenue</i></p>	<p>Memberikan input teknis pelaksanaan kajian identifikasi potensi peningkatan sumber pendapatan dan pembiayaan provinsi Aceh melalui pajak dan non pajak, kajian naskah akademis qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh, dan Kajian Penataan Ulang SOTK Pemisahan BPKA dengan Dispenda</p>	<p>Temuan dan rekomendasi kajian telah dilaporkan dan didiskusikan dengan pejabat kunci provinsi. Kajian akan difinalisasi di akhir 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Aceh. Hasil kajian memberikan masukan terhadap pembentukan untuk kebijakan DAD berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 maupun revisi UU 11/2006 	<p>Mendukung pengembangan rencana pembiayaan pembangunan berkelanjutan Provinsi Aceh dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk asistensi/ fasilitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Qanun pengelolaan keuangan Aceh (Dana Abadi, PAD, Otsus) Pembentukan Kelembagaan / SOTK pengelolaan keuangan Aceh Mekanisme pengumpulan pendapatan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu kehati-hatian dalam memahami konteks lokal baik dalam implementasi maupun politik Kemampuan untuk memahami situasi/dinamika politik di lokasi/tempat berkegiatan, untuk menemukan siapa orang yang tepat, bagaimana membahasakan dukungan serta cara mencapai tujuan 	<p>EOPO 2 IO 4 & 6</p>
<p>2A.3 <i>Support for Aceh Government Law Revision</i></p>	<p>Implementasi ditunda: Fase transisi belum memberikan dukungan, kebutuhan untuk usulan revisi UUPA, menjadi kewenangannya legislatif. Sebagai informasi, laporan kajian pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh telah disampaikan kepada eksekutif (Gubernur) dan legislatif (Ketua DPRA) di Aceh dan DPR-RI dari DAPIL Aceh</p>			<ol style="list-style-type: none"> Melanjutkan kajian penggunaan dana Otsus dengan melibatkan kabupaten kota dan masyarakat, dalam rangka perpanjangan UU Otsus Aceh. Asistensi/mendukung proses revisi UU Aceh dengan semangat pengelolaan Dana Otsus (UU-PA) yang lebih transparan, akuntabel dan terukur. Mendukung proses komunikasi publik terkait realisasi penggunaan/ pemanfaatan dana Otsus. 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu kehati-hatian dalam memahami konteks lokal baik dalam implementasi maupun politik Kemampuan untuk memahami situasi/dinamika politik di lokasi/tempat berkegiatan, untuk menemukan siapa orang yang tepat, bagaimana membahasakan dukungan serta cara mencapai tujuan 	<p>EOPO 2 IO 4 & 6</p>
<p>2B.1 <i>Support for formulation of Papua and Papua Barat Development Action Plan (RAPPP)</i></p>	<p>Implementasi ditunda: Akan menjadi bagian dari Multiyear workplan SKALA</p>			<p>Mendukung Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menerjemahkan implementasi UU Otsus Papua melalui dukungan teknis terkait Perdasi, Perdasus dan PMK 76, termasuk menerjemahkan RAPPP.</p>	<p>Perlu melibatkan Pemerintah Pusat dalam perencanaan di daerah, serta perlu melibatkan Pemerintah Daerah dalam implementasi program Pemerintah Pusat.</p>	<p>EOPO 2 IO 4</p>

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 2 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT DAERAH

2B.2

Support for annual planning and budgeting at province and district level for Papua province

1. Memberikan input teknis penyiapan panduan penganggaran SIO Papua dan penganggaran penyediaan guru dengan mengacu pada PMK 76/2022 tentang pengelolaan penerimaan OTSUS.
2. Memfasilitasi sosialisasi kedua panduan penganggaran tersebut pada agenda Bimtek PMK 76/2022 untuk Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat
3. Memfasilitasi dan memberikan input teknis penyiapan simulasi penerimaan Provinsi Papua untuk penyusunan RAPBD 2023

1. Kedua panduan penganggaran digunakan untuk studi kasus dalam kegiatan sosialisasi PMK 76/2022,
2. Panduan penganggaran SIO Papua digunakan oleh pemerintah Kabupaten Nabire, Asmat, Boven Digoel dan Jayapura sebagai basis untuk penyusunan anggaran 2023.
3. Pemerintah Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang dan Kepulauan Yapen menyampaikan ketertarikan untuk menganggarkan pendataan SIO Papua, untuk didiskusikan lebih lanjut.
4. Pemerintah provinsi dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam alokasi Dana Otsus di 2023, termasuk diperlukannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Input teknis Tim Transisi meningkatkan kapasitas Pemda dalam perencanaan pengelolaan dana Otsus
2. Panduan Penganggaran digunakan oleh Pemkab/Pemkot untuk TA 2023

1. Melanjutkan penguatan kapasitas/pendampingan kepada Pemerintah Daerah tentang kodifikasi nomenklatur sesuai PP No. 106 Tahun 2021.
2. Melanjutkan penguatan kapasitas/pendampingan kepada Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai nomenklatur, termasuk penguatan kapasitas penggunaan SIKD-OTSUS, serta PPSB (Prioritas Program Strategis Bersama) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Asistensi/fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat daerah, termasuk Perdasi dan Perdasus, khususnya dalam penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial OAP.
4. Melanjutkan dukungan dalam penguatan strategi komunikasi Otsus serta implementasi proses sosialisasi tentang realisasi penggunaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus

1. Perlu mempertimbangkan konteks DOB (baik dinamika politik maupun kondisi institusionalisasi) karena akan ada perbedaan dukungan yang diberikan di provinsi induk dan DOB.
2. Rekomendasi dukungan di Provinsi Induk akan lebih banyak bermain di level kabupaten/kota, namun dukungan di DOB akan mengarah pada penguatan kapasitas di tingkat provinsi.
3. Perlu kehati-hatian dalam memahami konteks lokal baik dalam implementasi maupun politik
4. Kemampuan untuk memahami situasi/dinamika politik di lokasi/tempat berkegiatan, untuk menemukan siapa orang yang tepat, bagaimana membahasakan dukungan serta cara mencapai tujuan

**EOPO 2
IO 4, 5 & 6**

2C.3

Support to formulation of Papua and Papua Barat Development Action Plan (RAPPP)

Implementasi ditunda:
Akan menjadi bagian dari Multiyear workplan SKALA

Advokasi implementasi UU Otsus Papua, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, RAPPP dan PMK No. 76 Tahun 2022 ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk DOB

1. Perlu melibatkan Pemerintah Pusat dalam perencanaan di daerah, serta perlu melibatkan Pemerintah Daerah dalam implementasi program Pemerintah Pusat.
2. Perspektif GEDSI perlu dibuat secara eksplisit

**EOPO 2
IO 4, 5 & 6**

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 2 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT DAERAH

2C.2

Support to formulation of local regulations mandated by Papua Special Autonomy Law for Papua Barat province

Implementasi ditunda:

Akan menjadi bagian dari Multiyear workplan SKALA

1. Perlu melibatkan Pemerintah Pusat dalam perencanaan di daerah, serta perlu melibatkan Pemerintah Daerah dalam implementasi program Pemerintah Pusat.
2. Perspektif GEDSI perlu dibuat secara eksplisit
3. perlu mempertimbangkan konteks DOB (baik dinamika politik maupun kondisi institusionalisasi) karena akan ada perbedaan dukungan yang diberikan di provinsi induk dan DOB.
4. Rekomendasi dukungan di Provinsi Induk akan lebih banyak bermain di level kabupaten/kota, namun dukungan di DOB akan mengarah pada penguatan kapasitas di tingkat provinsi.

2C.3

Support for annual planning and budgeting at province and district level for Papua Barat province

1. Memfasilitasi dan memberikan input teknis kepada Pemerintah Papua Barat untuk mendorong implementasi PROSPPEK/SAIK+ ke tingkat kabupaten (input dalam bentuk dokumen Panduan PROSPPEK tingkat kabupaten).
2. Memfasilitasi sosialisasi kedua panduan penganggaran tersebut pada agenda BIMTEK PMK No. 76 Tahun 2022 untuk Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat
3. Memfasilitasi dan memberikan input teknis penyiapan simulasi penerimaan Papua Barat untuk penyusunan RAPBD TA 2023.

1. SAIK+, yang sebelumnya dibiayai melalui program PROSPPEK di tingkat provinsi, sekarang dibiayai secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Strategi pembayaran ini disesuaikan dengan perubahan skema transfer Dana Otsus sesuai revisi UU Otsus

Penganggaran SAIK+ menjadi prasyarat pengajuan RAP Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk alokasi dana Otsus.

1. Melanjutkan penguatan kapasitas/ pendampingan kepada Pemerintah Daerah tentang kodifikasi nomenklatur sesuai PP No. 106 Tahun 2021.
2. Melanjutkan penguatan kapasitas/ pendampingan kepada Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai nomenklatur, termasuk penguatan kapasitas penggunaan SIKD-OTSUS, serta PPSB (Prioritas Program Strategis Bersama) Provinsi dan Kabupaten/Kota (mencakup PROSPPEK, SAIK+, dsb).
3. Asistensi/fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat daerah, termasuk Perdesia dan Perdasus, khususnya dalam penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial OAP.
4. Melanjutkan dukungan dalam penguatan strategi komunikasi Otsus serta implementasi proses sosialisasi tentang realisasi penggunaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus.

1. Perlu melibatkan Pemerintah Pusat dalam perencanaan di daerah, serta perlu melibatkan Pemerintah Daerah dalam implementasi program Pemerintah Pusat.
2. Perspektif GEDSI perlu dibuat secara eksplisit
3. Perlu mempertimbangkan konteks DOB (baik dinamika politik maupun kondisi institusionalisasi) karena akan ada perbedaan dukungan yang diberikan di provinsi induk dan DOB.
4. Rekomendasi dukungan di Provinsi Induk akan lebih banyak bermain di level kabupaten/kota, namun dukungan di DOB akan mengarah pada penguatan kapasitas di tingkat provinsi.

EOPO 2 IO 4

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 2 DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TINGKAT DAERAH

2C.4

Support to development of PROSPPEK OTSUS monitoring tools

1. Memfasilitasi dan memberikan input teknis penyusunan tools monitoring PROSPPEK yang mengacu pada desain PROSPPEK.
2. Memfasilitasi dan memberikan input teknis kepada Sekber PROSPPEK tentang mekanisme pelaksanaan monitoring
3. Mendampingi Sekber PROSPPEK dalam pelaksanaan monitoring di 1 kabupaten dan 1 kota

Tools monitoring PROSPPEK telah disiapkan dan disetujui bersama oleh Sekber PROSPPEK Papua Barat dan BPS Papua Barat. Hasil dari monitoring akan menentukan keberlanjutan program PROSPPEK dan strategi penganggarannya, terutama untuk melihat kemungkinan penggunaan nomenklatur Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB)

Hasil monitoring menjadi input untuk perbaikan tata kelola PROSPPEK/SAIK+

1. Melanjutkan penguatan kapasitas/ pendampingan kepada Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai nomenklatur, termasuk penguatan kapasitas penggunaan SIKD-OTSUS, serta PPSB (Prioritas Program Strategis Bersama) Provinsi dan Kabupaten/Kota (mencakup PROSPPEK, SAIK+, dsb).
2. penguatan peran distrik dalam penyediaan layanan dasar dan binwas kampung sebagai bagian dari implementasi PROSPPEK

1. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, namun ekspektasi tercapainya pemahaman Pemda tentang PROSPPEK belum terpenuhi. Hal ini dilihat berdasarkan:
 - a. Mayoritas kab/kota belum membentuk Sekber PROSPPEK.
 - b. Kegiatan monitoring dan pelaporan di tingkat kabupaten, distrik dan kampung tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 - c. Mayoritas Kab/kota masih menunggu penyaluran dana PROSPPEK dari Provinsi TA 2022.
2. Penandatanganan kesepakatan bersama tentang PROSPPEK oleh Kab/Kota tidak akan berarti tanpa adanya komitmen kuat dari Kepala Daerah dan stakeholder kunci dalam implementasi PROSPPEK.

**EOPO 2
IO 4 & 6**

KEGIATAN 3 DUKUNGAN TEKNIS ADOPTI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS LOKAL (LOGIS)

3A.1

Support to Aceh Government on establishment and operationalization of Satu Data Aceh

1. Memfasilitasi dan memberikan input teknis pemetaan pemain kunci dan sumber daya untuk operasionalisasi Satu Data Aceh, terutama di Kabupaten Aceh Jaya untuk didiskusikan lebih lanjut antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan Pusdatin Kemendagri
2. Memfasilitasi dan memberikan input teknis terhadap evaluasi dan monitoring aplikasi SIGAP

1. Terpetakannya pemain kunci, sistem eksisting dan sumber daya untuk operasionalisasi Satu Data Aceh, terutama di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Tersedianya masukan untuk perbaikan aplikasi SIGAP dari tingkat gampong hingga provinsi

1. Ownership pemerintah daerah yang kuat
2. ada dukungan legislatif (DPRA)
3. Penyiapan struktur tata kelola SIGAP
4. Bagian dari quality assurance
5. Tersedianya data yang dapat menjadi basis perencanaan dan penganggaran pembangunan, serta penetapan program prioritas daerah (*quickwins*).

1. Memfasilitasi penguatan tata kelola dan kelembagaan SIGAP
2. Memfasilitasi advokasi SIGAP dalam perencanaan dan penganggaran (RPJMD, RKP, Renstra, Renja) di provinsi dan kabupaten
3. Penguatan leadership untuk SIGAP
4. Policy level: fasilitasi/advokasi LOGIS masuk dalam *policy formulation cycle (PFM cycle)*, *Otsus policy* serta *national policy related to bottom-up data collection*
5. Penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah dalam memahami dan memanfaatkan data SIGAP untuk kebijakan

1. Ternyata permintaan replikasi besar, APBD mulai banyak dialokasikan, namun SDM tim transisi terbatas dan ToT baru disiapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi "from household to factory produce" harus dilakukan.
2. Perlu meninjau regulasi tentang data di level nasional maupun daerah karena LOGIS berkaitan dengan data. Penyusunan strategi perlu didahului dengan matangnya pemahaman tentang regulasi data.

**EOPO 1:
IO 2**

**EOPO 2:
IO 5 & 6**

**EOPO 3:
IO 9**

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 3 DUKUNGAN TEKNIS ADOPTI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS LOKAL (LOGIS)

<p>3A.1 <i>Support to Aceh Government on establishment and operationalization of Satu Data Aceh</i></p>	<p>Memfasilitasi, memberikan input teknis dalam jaminan kualitas perluasan SIGAP di Kab. Aceh Barat, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan evaluasi pelaksanaan SIGAP di Kab. Bireuen yang dibiayai oleh DPMG Aceh</p>	<p>1. 150 operator gampong di Kab. Aceh Barat, 60 operator gampong di Kab. Simeulue, 60 operator gampong di Kab. Nagan Raya, 150 operator gampong di Kab. Aceh Barat Daya mampu mengoperasikan SIGAP</p> <p>2. 45 orang aparaturnya pemerintahan gampong (Keuchik, Kaur Pemerintahan, operator) melaksanakan evaluasi mandiri penerapan SIGAP di Kab. Bireuen</p>	<p>1. Ada kapasitas untuk menyediakan data secara bottom-up dan berjenjang</p> <p>2. Agar progress dapat dimonitor/evaluasi</p>	<p>1. Memfasilitasi penguatan SDM pengelola SIGAP di gampong, kecamatan, dan kabupaten</p> <p>2. Penguatan gampong/PRG untuk pemutakhiran data</p>	<p>Peningkatan <i>ownership</i> dari kepala daerah sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program daerah maupun implementasi dukungan SKALA</p>	<p>EOPO 1: IO 2</p> <p>EOPO 2: IO 5 & 6</p> <p>EOPO 3: IO 9</p>
<p>3A.2 <i>Finalisation of Gampong Information System Roadmap</i></p>	<p>Memfasilitasi dan memberikan input teknis penyusunan dan finalisasi Roadmap SIGAP</p>	<p>Tersusunnya draft akhir Roadmap SIGAP yang akan difinalisasikan pada 2 Desember 2022</p>	<p>1. Roadmap sebagai bentuk institusionalisasi SIGAP</p> <p>2. SIGAP dengan <i>bottom-up data process</i> sebagai <i>basis evidence-based planning</i></p> <p>3. SIGAP sebagai implementasi rencana induk dan peta jalan SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)</p> <p>4. Sebagai <i>basis knowledge repository</i> (dengan adanya pergantian personil)</p>	<p>1. Melanjutkan pendampingan dan penguatan tata kelola kelembagaan dan operasional SATU Data Aceh serta implementasi roadmap SIGAP, melalui:</p> <p>a. fasilitasi advokasi SIGAP masuk dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) di provinsi dan kabupaten</p> <p>b. fasilitasi penguatan kapasitas aparaturnya pemerintahan gampong, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi dalam memahami dan memanfaatkan data SIGAP untuk kebijakan dan perencanaan penganggaran, termasuk pemanfaatan data <i>by name by address</i> yang menyangkut kelompok perempuan, disabilitas dan rentan (GEDSI)</p> <p>c. fasilitasi penguatan pejabat kunci serta SDM pengelola SIGAP di gampong, kecamatan, kabupaten, dan provinsi</p> <p>d. fasilitasi penguatan operator gampong/PRG/KIG sebagai penggerak dalam pemutakhiran dan pemanfaatan data melalui kerjasama dengan BPS (Koseka) dan Kominsa</p> <p>e. fasilitasi pengembangan dan penguatan <i>system and maintenance</i> (Q/A) SIGAP</p>	<p>1. Perlu memastikan sustainability: memastikan kegiatan/program diinisiasi/di-drive oleh Pemerintah/Pemda dengan <i>enabling factors</i> yang mumpuni.</p> <p>2. Perlu meninjau regulasi tentang data di level nasional maupun daerah karena LOGIS berkaitan dengan data. Penyusunan strategi perlu didahului dengan matangnya pemahaman tentang regulasi data.</p>	<p>EOPO 1: IO 2</p> <p>EOPO 2: IO 5 & 6</p> <p>EOPO 3: IO 9</p>

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 3 DUKUNGAN TEKNIS ADOPTI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS LOKAL (LOGIS)

<p>3A.3 <i>Support for utilization of SIGAP as one of the data source on planning and budgeting process</i></p>	<p>Implementasi ditunda: Akan menjadi bagian dari Multiyear workplan SKALA</p>				<p>Perlu memastigkan sustainability: memastikan kegiatan/program diinisiasi/di-drive oleh Pemerintah/Pemda dengan <i>enabling factors</i> yang mumpuni.</p>	<p>EPO1: IO 2</p> <p>EPO2: IO 5 & 6</p> <p>EPO3: IO 9</p>
--	---	--	--	--	---	---

<p>3B.1 GOVERNANCE: <i>Support to ensure better collaboration between government office to run locally generated information system (SIO Papua)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi dan memberikan input teknis mengenai SIO Papua dalam kerangka SATU DATA Papua dalam Rakor Forum Data se-Papua (29 kab/kota) Memfasilitasi dan memberikan input teknis dalam pemaparan tentang SIO Papua (tata kelola, penganggaran, business process, manfaat dll) kepada Pemerintah Kabupaten Supiori, Biak Numfor, Keerom, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang dan Yapen. Memfasilitasi dan memberikan input teknis advokasi awal kepada Pejabat Gubernur Papua Selatan untuk implementasi SIO Papua di Provinsi Papua Selatan Memfasilitasi dan memberikan input teknis dalam Forum Data tingkat distrik 	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua menandatangani persetujuan dan mendukung SIO Papua sebagai sistem pendataan yang menyediakan data terpilah OAP dan non-OAP untuk kebutuhan Otsus 3 pemerintah kabupaten diluar kabupaten pilot telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan pendataan SIO Papua di tahun 2022 Pendataan SIO Papua telah dilaksanakan di 5 kabupaten (dari total 29 kabupaten/kota), dengan jumlah jiwa terdata 103.308 jiwa (per 25 November 2022) 	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi mandat UU Otsus dengan menyediakan data terpilah OAP dan non-OAP dari tingkat bawah (kampung) Merupakan sistem yang baru pertama di Indonesia dalam hal penyediaan/ pengumpulan data dari bawah (BPS baru inisiasi Desa Cantik) Peningkatan awareness dan ownership Pemda terhadap SIO Papua Mulai ada dukungan dari tingkat nasional (Bappenas) Adanya pengakuan dari BPS Provinsi sebagai SSD Proses institusionalisasi terbentuk di setiap level (termasuk distrik) Menyediakan data terpilah (jenis kelamin, disabilitas, umur) 	<ol style="list-style-type: none"> Melanjutkan pendampingan dan fasilitasi penguatan tata kelola dan operasional SAIK+ dan SIO Papua, melalui: <ol style="list-style-type: none"> fasilitasi advokasi kebijakan tingkat provinsi (termasuk strategi advokasi di DOB) untuk penguatan kelembagaan dan perluasan/replikasi; fasilitasi perluasan/replikasi ke kabupaten dan provinsi pemekaran, termasuk penguatan kapasitas SDM di semua level (kampung-provinsi); fasilitasi penguatan distrik untuk binwas kampung dalam rangka pengumpulan, pemutakhiran dan pemanfaatan data untuk peningkatan layanan dasar khususnya menasar kelompok perempuan, disabilitas dan rentan (GEDSI); fasilitasi penguatan pemanfaatan data oleh setiap level pemerintahan (kampung-provinsi) fasilitasi pemadanan data terpilah OAP dan Non OAP dengan data hasil Regsosek dan analisis data; fasilitasi penguatan pejabat kunci serta SDM pengelola SAIK+ dan SIO Papua di kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi; 	<ol style="list-style-type: none"> Ternyata permintaan replikasi besar, APBD mulai banyak dialokasikan, namun SDM tim transisi terbatas dan ToT baru disiapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi “from household to factory produce” harus dilakukan. Perlu memastigkan sustainability: memastikan kegiatan/program diinisiasi/di-drive oleh Pemerintah/Pemda dengan <i>enabling factors</i> yang mumpuni. Ruang gerak untuk penguatan peran distrik sebagai pusat pelayanan perlu diperbesar, khususnya dalam pelayanan adminduk, pendampingan/binwas ke kampung. Perlu ada strategi penguatan distrik sebagai garda terdepan. perlu mempertimbangkan konteks DOB (baik dinamika politik maupun kondisi institusionalisasi) karena akan ada perbedaan dukungan yang diberikan di provinsi induk dan DOB. Rekomendasi dukungan di Provinsi Induk akan lebih banyak bermain di level kabupaten/kota, namun dukungan di DOB akan mengarah pada penguatan kapasitas di tingkat provinsi. 	<p>EPO1: IO 2</p> <p>EPO2: IO 5 & 6</p> <p>EPO3: IO 9</p>
---	--	--	--	---	--	---

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 3 DUKUNGAN TEKNIS ADOPTI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS LOKAL (LOGIS)

<p>3B.2 APPLICATION: <i>Support to district/ cities governments in development, maintenance, management (including hand-over of cloud storage) of SIO Papua application</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi dan memberikan input teknis pengembangan aplikasi SIO Papua secara lebih stabil dengan bugs yang minimal Memfasilitasi penyediaan server SIO Papua yang telah siap untuk diserahkan kepada 5 pemerintah kabupaten (Kab. Jayapura, Asmat, Nabire, Boven Digoel, Supiori) 	<ol style="list-style-type: none"> Aplikasi SIO Papua dapat beroperasi secara lebih stabil Aplikasi SIO Papua siap untuk diserahkan kepada 5 pemerintah kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai basis sistem terstandar sesuai SPBE (dapat dibagi pakai) Sebagai bentuk <i>transfer of knowledge</i> dan <i>skills</i> dari program ke Pemda (sistem aplikasi) 	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi penguatan sistem dan <i>maintenance</i> (Q&A) SIO Papua. Melanjutkan fasilitasi dan penguatan tata kelola integrasi data (terpilah OAP-Non OAP, Regsosek, Siskeudes, Prodeskel) dan sistem SIO Papua melalui sistem SIPD-SEPAKAT. 	<p>Perlu memastikan sustainability: memastikan kegiatan/program diinisiasi/di-drive oleh Pemerintah/Pemda dengan <i>enabling factors</i> yang mumpuni.</p>	<p>EPO1: IO 2</p> <p>EPO2: IO 5 & 6</p> <p>EPO3: IO 9</p>
<p>3B.3 APPLICATION: <i>Support to continuation and replication of SIO Papua</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi training for trainers SIO Papua Memfasilitasi dan memberikan input teknis kepada Pemerintah Kabupaten Supiori dan Nabire untuk replikasi SIO Papua 	<ol style="list-style-type: none"> 13 pelatih SIO Papua di tingkat provinsi (terdiri atas anggota Perangkat Daerah Provinsi - Bappeda, Diskominfo, BPS, DPMK dan narasumber lokal) telah mampu memfasilitasi pelatihan SIO Papua untuk kader kampung 78 kader kampung di Kabupaten Supiori dan 33 kader kampung di Kabupaten Nabire mampu melakukan pendataan keluarga berbasis kampung menggunakan SIO Papua 	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai bentuk <i>scaling up (from household to factory)</i> Sebagai bentuk advokasi luas (lintas kab) untuk mendorong provinsi lebih berperan (masuk dalam struktur SDI di daerah) Menyediakan kapasitas terpasang di setiap level pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi perluasan/replikasi SIO Papua ke kabupaten dan provinsi pemekaran, termasuk penguatan kapasitas SDM di semua level (kampung-provinsi) Memfasilitasi penguatan distrik untuk binwas kampung dalam rangka pengumpulan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data untuk peningkatan layanan dasar 	<p>Ternyata permintaan replikasi besar, APBD mulai banyak dialokasikan, namun SDM tim transisi terbatas dan ToT baru disiapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi “<i>from household to factory produce</i>” harus dilakukan.</p>	<p>EPO1: IO 2</p> <p>EPO2: IO 5 & 6</p> <p>EPO3: IO 9</p>

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 3 DUKUNGAN TEKNIS ADOPTI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS LOKAL (LOGIS)

<p>3B.4 DATA COLLECTION: <i>Support collaboration between SEPAKAT Desa and SIO Papua dalam rangka REGSOSEK</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi dan memberikan input teknis terhadap joint mission assessment dalam rangka integrasi SIO Papua dengan data REGSOSEK/ aplikasi SEPAKAT Desa Memfasilitasi dan memberikan input teknis terhadap dialog antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Bappenas dalam rangka diskusi bagi-pakai data REGSOSEK dan penggunaan SIO Papua sebagai aplikasi pemutakhiran data REGSOSEK Memfasilitasi dan memberikan input teknis pengembangan aplikasi SEPAKAT untuk mengakomodir data REGSOSEK Memberikan input teknis tentang SIO Papua kepada Pemprov Papua dalam rangka Rakorsos Regsosek Provinsi Papua 	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan antara Bappenas dan Pemerintah Provinsi Papua dengan dukungan Tim Transisi untuk mempelajari lebih lanjut kolaborasi antara REGSOSEK/SEPAKAT Desa dengan SIO Papua, termasuk tata kelola integrasi, strategi peningkatan kapasitas, dan skema pemutakhiran data Tersedianya website REGSOSEK yang merupakan bagian dari aplikasi SEPAKAT (https://sepakat.bappenas.go.id/regsosek/). Kolaborasi antara SIO Papua dan Regsosek mendapat dukungan oleh BPS dan Bappeda seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua 	<p>Sebagai inisiatif untuk menjembatani sinergi/kolaborasi pusat-daerah dalam penyediaan data termasuk analisis sesuai kebutuhan di semua level</p>	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi integrasi data (terpilah OAP-Non OAP, Regsosek, Siskeudes, Prodeskel) melalui sistem SIPD-SEPAKAT-SIO Papua Fasilitasi penguatan tata kelola integrasi data pusat-daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu kehati-hatian dalam menghadapi dinamika lintas K/L yang sangat tinggi, misalkan kewenangan data perlinosos dalam DTKS dan Regsosek. Perspektif GEDSI perlu dibuat secara eksplisit Perlu meninjau regulasi tentang data di level nasional maupun daerah karena LOGIS berkaitan dengan data. Penyusunan strategi perlu didahului dengan matangnya pemahaman tentang regulasi data. 	<p>EOPO 1: IO 2</p> <p>EOPO 2: IO 5 & 6</p> <p>EOPO 3: IO 9</p>
<p>3B.5 DATA UTILIZATION: <i>Support to utilization of SIO Papua for planning and budgeting at village, district and province level</i></p>	<p>Memfasilitasi dan memberikan input teknis pemanfaatan data SIO Papua di tingkat distrik melalui DMMD</p>	<p>Mendampingi Pemkab Jayapura dalam pemanfaatan data SIO Papua untuk pelayanan adminduk di tingkat distrik di Kab. Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai penyedia basis data evaluasi kinerja pembangunan (visi-misi) bupati Sebagai bukti efektivitas pelimpahan kewenangan kepada distrik untuk pelayanan berbasis data 	<p>Memfasilitasi pemanfaatan data SIO Papua oleh setiap level pemerintahan (kampung-provinsi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Utilisasi data menjadi penting dalam perencanaan dan anggaran. Perspektif GEDSI perlu dibuat secara eksplisit dalam pemanfaatan data, khususnya untuk program pembangunan yang menasar kelompok perempuan, orang dengan disabilitas dan kelompok rentan. Perspektif GEDSI perlu dibuat secara eksplisit 	<p>EOPO 1: IO 2</p> <p>EOPO 2: IO 5 & 6</p> <p>EOPO 3: IO 9</p>

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 3 DUKUNGAN TEKNIS ADOPTI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS LOKAL (LOGIS)

<p>3B.6 <i>VILLAGE CADRES: Support to provision and capacity building of village cadres</i></p>	<p>Implementasi ditunda: Akan menjadi bagian dari Multiyear workplan SKALA</p>				<p>ToT menjadi model yang akan sangat bermanfaat untuk Papua dan Papua Barat, namun bobot simulasi dalam ToT harus lebih besar dari 60%.</p>	<p>EOPO 1: IO 2</p> <p>EOPO 2: IO 5 & 6</p> <p>EOPO 3: IO 9</p>
--	---	--	--	--	--	---

<p>3C.1 <i>GOVERNANCE: Support to ensure better collaboration between government office to run locally generated information system (SAIK+)</i></p>	<p>1. Memfasilitasi dan memberikan input teknis untuk pengalokasian anggaran SAIK+ TA 2023 di Kab. Kaimana, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambraw, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama 2. Memfasilitasi dan memberikan input teknis penyusunan Pergub SAIK+ Papua Barat</p>	<p>1. Input terhadap RKA SAIK+ di 4 kabupaten (Kaimana, Tambrauw, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama) telah tersedia untuk dimanfaatkan oleh masing-masing pemkab dalam penyusunan APBD 2023. 2. SAIK+ telah masuk dalam Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus TA 2023 3. Pendataan SAIK+ telah dilaksanakan di 11 kabupaten (dari total 13 kabupaten/kota), dengan jumlah jiwa terdata 300.618 jiwa (per 25 November 2022) 4. Tersedianya rancangan Peraturan Gubernur tentang SAIK+ 5. Bappeda Papua Barat telah mengalokasikan dana untuk cloud server melalui APBD revisi 2022</p>	<p>1. Tata kelola SAIK+ sudah mulai berjalan di seluruh 13 kab/kota di Provinsi Papua Barat 2. Ownership pemerintah yang kuat terhadap SAIK+</p>	<p>fasilitasi advokasi kebijakan tingkat provinsi (termasuk strategi advokasi di DOB) untuk penguatan kelembagaan dan perluasan/replikasi</p>	<p>1. Ternyata permintaan replikasi besar, APBD mulai banyak dialokasikan, namun SDM tim transisi terbatas dan ToT baru disiapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi “from household to factory produce” harus dilakukan. 2. Perlu memastikan sustainability: memastikan kegiatan/program diinisiasi/di-drive oleh Pemerintah/Pemda dengan enabling factors yang mumpuni. 3. Ruang gerak untuk penguatan peran distrik sebagai pusat pelayanan perlu diperbesar, khususnya dalam pelayanan adminduk, pendampingan/binwas ke kampung. Perlu ada strategi penguatan distrik sebagai garda terdepan. 4. perlu mempertimbangkan konteks DOB (baik dinamika politik maupun kondisi institusionalisasi) karena akan ada perbedaan dukungan yang diberikan di provinsi induk dan DOB. 5. Rekomendasi dukungan di Provinsi Induk akan lebih banyak bermain di level kabupaten/kota, namun dukungan di DOB akan mengarah pada penguatan kapasitas di tingkat provinsi.</p>	<p>EOPO 1: IO 2</p> <p>EOPO 2: IO 5 & 6</p> <p>EOPO 3: IO 9</p>
--	---	---	--	---	--	---

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 3 DUKUNGAN TEKNIS ADOPTI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS LOKAL (LOGIS)

3C.2

APPLICATION:
Support to district/ city governments in development, maintenance, management (including hand-over of cloud storage) of SAIK+ application

1. Memfasilitasi dan memberikan input teknis pengembangan aplikasi SAIK+ secara lebih stabil dengan bugs yang minimal
2. Memfasilitasi penyediaan aplikasi dan data dummy SAIK+ untuk digunakan dalam pelatihan

1. Aplikasi SAIK+ dapat beroperasi secara lebih stabil
2. Tersedianya aplikasi dan data dummy SAIK+ untuk digunakan dalam pelatihan

1. Sebagai basis sistem terstandar sesuai SPBE (dapat dibagi-pakai).
2. Sebagai bentuk *transfer of knowledge* dan *skills* dari program ke Pemda (sistem aplikasi).

1. Memfasilitasi penguatan sistem dan maintenance (Q&A) SAIK+.
2. Fasilitas penguatan pejabat kunci serta SDM pengelola SAIK+ dan SIO Papua di kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi

Perlu **memastikan sustainability**: memastikan kegiatan/program diinisiasi/di-drive oleh Pemerintah/Pemda dengan *enabling factors* yang mumpuni.

EOPO 1:
IO 2

EOPO 2:
IO 5 & 6

EOPO 3:
IO 9

3C.3

APPLICATION:
Support to continuation and replication of SAIK+

1. Memfasilitasi training for trainers SAIK+
2. Memfasilitasi dan memberikan input teknis kepada Pemerintah Kabupaten Sorong untuk pelatihan administrator di distrik
3. Memfasilitasi dan memberikan input teknis kepada Pemerintah Pegunungan Arfak untuk replikasi SAIK+

1. 12 pelatih SAIK+ di tingkat provinsi (terdiri atas anggota Perangkat Daerah Provinsi - Bappeda, Diskominfo, BPS, DPMK, Disdukcapil dan narasumber lokal) telah mampu memfasilitasi pelatihan SAIK+ untuk kader kampung
2. 30 administrator distrik di Kabupaten Sorong mampu mengoperasikan aplikasi SAIK+
3. 153 kader kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak mampu melakukan pendataan keluarga berbasis kampung menggunakan SAIK+

1. Sebagai bentuk scaling up (from household to factory)
2. Sebagai bentuk advokasi luas (lintas kab) untuk mendorong provinsi lebih berperan (masuk dalam struktur SDI di daerah)
3. Menyediakan kapasitas terpasang di setiap level pemerintahan

1. Memfasilitasi perluasan/replikasi SAIK+ ke kabupaten dan provinsi pemekaran, termasuk penguatan kapasitas SDM di semua level (kampung-provinsi)
2. Memfasilitasi penguatan distrik untuk binwas kampung dalam rangka pengumpulan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data untuk peningkatan layanan dasar

Ternyata permintaan replikasi besar, APBD mulai banyak dialokasikan, namun SDM tim transisi terbatas dan ToT baru disiapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi *“from household to factory produce”* harus dilakukan.

EOPO 1:
IO 2

EOPO 2:
IO 5 & 6

EOPO 3:
IO 9

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

KEGIATAN 3 DUKUNGAN TEKNIS ADOPTI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS LOKAL (LOGIS)

3C.4

DATA COLLECTION: Support to collaboration between Regsosek/SEPAKAT-Desa and SAIK+ Papua Barat

1. Memfasilitasi dan memberikan input teknis terhadap joint mission assessment dalam rangka integrasi SAIK+ dengan data REGSOSEK/ aplikasi SEPAKAT Desa
2. Memfasilitasi dan memberikan input teknis terhadap dialog antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Bappenas dalam rangka diskusi bagi pakai data REGSOSEK dan penggunaan SAIK+ sebagai aplikasi pemutakhiran data REGSOSEK
3. Memfasilitasi dan memberikan input teknis pengembangan aplikasi SEPAKAT untuk mengkomodir data REGSOSEK

1. Persetujuan antara Bappenas dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan dukungan Tim Transisi untuk mempelajari lebih lanjut kolaborasi antara REGSOSEK/SEPAKAT Desa dengan SAIK+, termasuk tata kelola integrasi, strategi peningkatan kapasitas, dan skema pemutakhiran data.
2. Tersedianya website REGSOSEK yang merupakan bagian dari aplikasi SEPAKAT (<https://sepakat.bappenas.go.id/regsosek/>).

Sebagai inisiatif untuk menjembatani sinergi/kolaborasi pusat-daerah dalam penyediaan data termasuk analisis sesuai kebutuhan di semua level

1. Fasilitasi integrasi data (terpilah OAP-Non OAP, Regsosek, Siskeudes, Prodeskel) melalui sistem SIPD-SEPAKAT-SAIK+
2. Fasilitasi penguatan tata kelola integrasi data pusat-daerah

Perlu kehati-hatian dalam menghadapi dinamika lintas K/L yang sangat tinggi, misalkan kewenangan data perlinso dalam DTKS dan Regsosek.

**EOP0 1:
IO 2**

**EOP0 2:
IO 5 & 6**

**EOP0 3:
IO 9**

3C.5

DATA UTILIZATION: Support to utilization of SAIK+ for planning and budgeting at village, district and province level

1. Memberikan input teknis terhadap bagi pakai data SAIK+ antara Bappeda Provinsi Papua Barat dan BPJS Papua Barat
2. Memberikan input teknis terhadap usulan program *quick wins* Fakfak (berupa pemanfaatan data SAIK+ untuk perlindungan afirmasi OAP - Fakfak Sehat dan Fakfak Pintar)

1. Data SAIK+ siap digunakan oleh BPJS untuk skema pembiayaan kesehatan OAP
2. Tersedianya rancangan awal program *quick wins* Fakfak yang termasuk pemanfaatan data SAIK+

1. Sebagai pemanfaatan data OAP untuk pemenuhan KIS dalam mendukung program UHC untuk OAP di Provinsi Papua Barat
2. Sebagai pemanfaatan data SAIK+ dalam rancangan menengah untuk penyusunan program di Kabupaten Fakfak
3. Dukcapil Provinsi sudah menggunakan data SAIK+ untuk validasi data kependudukan Kab. Sorong

Memfasilitasi pemanfaatan data SAIK+ oleh setiap level pemerintahan (kampung-provinsi)

1. Utilisasi data menjadi penting dalam perencanaan dan penganggaran.
2. Perspektif GEDSI perlu dibuat secara eksplisit dalam pemanfaatan data, khususnya untuk program pembangunan yang menasar kelompok perempuan, orang dengan disabilitas dan kelompok rentan.

**EOP0 1:
IO 2**

**EOP0 2:
IO 5 & 6**

**EOP0 3:
IO 9**

Sub-kegiatan	Rincian Kegiatan	Hasil Kunci	Signifikasi	Rekomendasi untuk Dukungan SKALA	Pembelajaran Berdasarkan Rangkaian Hasil serta Hal yang Perlu Difaktorkan ke Depan	Keterkaitan Hasil Kunci Dengan IO SKALA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

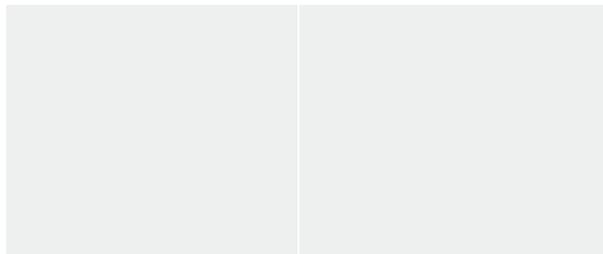
KEGIATAN 3 DUKUNGAN TEKNIS ADOPSI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI BERBASIS LOKAL (LOGIS)

3C.6

VILLAGE CADRES:
Support to provision and capacity building of village cadres

Implementasi ditunda:

Akan menjadi bagian dari Multiyear workplan SKALA



Fasilitasi dan penguatan kader kampung sebagai penggerak perubahan di tingkat kampung termasuk dalam pemutakhiran dan pemanfaatan data.

ToT menjadi model yang akan sangat bermanfaat untuk Papua dan Papua Barat, namun **bobot simulasi dalam ToT harus lebih besar dari 60%**.

EOP0 1:
IO 2

EOP0 2:
IO 5 & 6

EOP0 3:
IO 9

